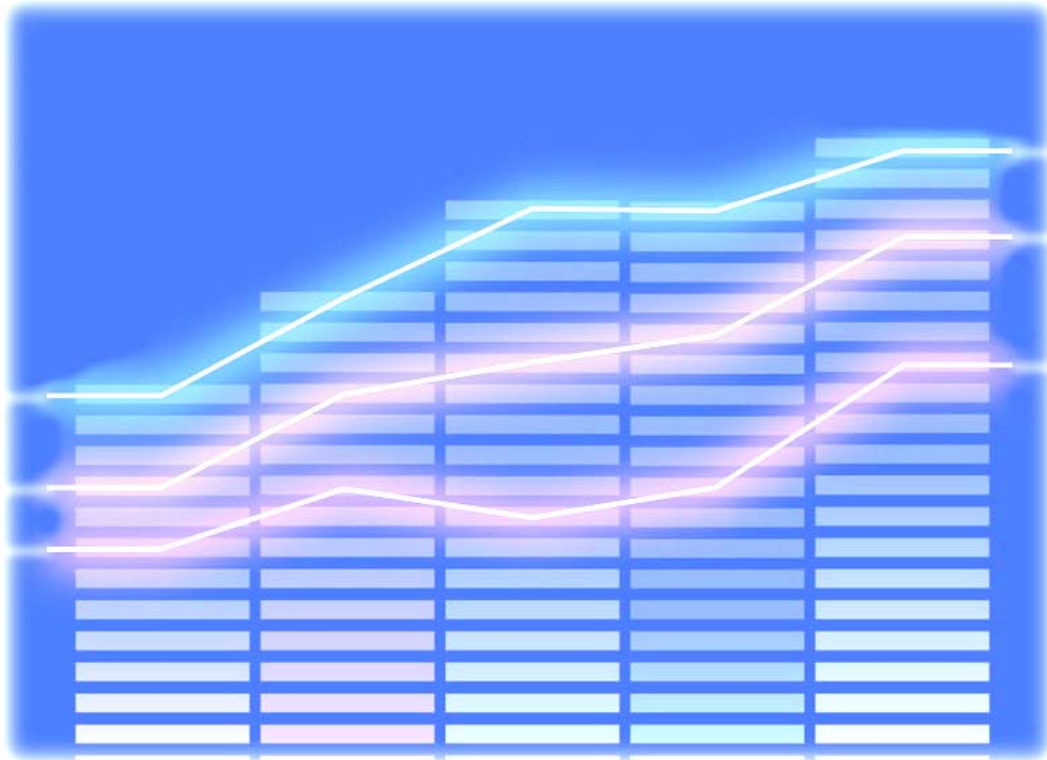


SURVEI KABUPATEN/KOTA TERBAIK DI INDONESIA UNTUK BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL TAHUN 2009



BKPM

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL



Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

TIM PENELITIAN:

P. Agung Pambudi, Ig. Sigit Murwito, Robert Endi Jaweng, Firman Bakri Anom, Boedi Rheza. **Koordinator Peneliti Daerah:** Teuku Zulham SE, Msi., Daniel Collyn Damanik SE., MM., Edi Indrizal M.Si., M., Ansor MA., Drs. Zamzami A Karim MA., Dr. H. Didik Susetyo SE., MSi., Lizar Alfansi Phd., Dr. Syurya Hidayat SE., ME., Marselina SE., Mpm., Zufriady SE., MM., Dr. Yunizar, Abdullah Syafi'i S.Si., ME., Ir. Dahri Tanjung MS., MG. Westrie Kekalih S., Teguh Yuliono ST., MM., Retno Tanding Suryandari SE., ME., Sukasmanto SE, Msi., Ir. Siti Asfiah, Dr. Rafael Purতোমো Somaji, Aan Eko Widiarto SH., MH., Samsul Arifin M.S.E., Taufik Hidayat SP., Windu Putra SE., MS., Noorhalis Majid SH., Yulia Raemae S.Hut., Purwadi SE, M.Si., Dr. Grevo Gerung., Drs. Budiman Jaya A.A. Msi., H .Halim SE., MS., Drs. H. Bernard MS., Drs. Lukas Sampe., Arusdin Bone, Dr. Lalu A. A. Bakti, Zet Ena SE., Drs. Robert Mirsael SVD., MA., Ir. George Corputty, Abdoellah Aly, Dr. Musaad SE. MS., Ir. Achmad Rochani MS., Sudirman Zuhdi.

KATA PENGANTAR

Tahun 2009, BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) bekerjasama dengan KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah) guna menyelenggarakan Survei Kabupaten/Kota Terbaik dalam Bidang Pelayanan Penanaman Modal. Survei tersebut diselenggarakan di 291 (dua ratus sembilan puluh satu) Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Penelitian tersebut diselenggarakan pada kurun waktu 5 (lima) bulan, yaitu terhitung mulai Bulan Agustus-November 2009.

Hasil survei tersebut kemudian digunakan untuk menyusun indeks Kabupaten dan Kota terbaik dalam bidang pelayanan penanaman modal pada tahun 2009. Hasil survei dan indeks tersebut kami paparkan secara lebih lanjut dalam laporan ini. Kami harap hasil survei ini dapat digunakan sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan terkait dengan pelayanan penanaman modal baik ditingkat daerah maupun ditingkat pusat.

Terimakasih

TIM PENELITI

DAFTAR ISI:

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI:..... | iv |
| I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| I.1 Latar Belakang..... | 1 |
| I.2 Tujuan Penelitian..... | 2 |
| I.3 Signifikansi..... | 2 |
| II. METODOLOGI | 3 |
| II.1 Kerangka Berfikir..... | 3 |
| II.2 Indikator Penilaian. | 5 |
| II.3 Ruang lingkup penelitian | 5 |
| II.4 Pendekatan Penelitian | 6 |
| II.5 Data dan Pengumpulan Data..... | 6 |
| II.5 Teknik Pengambilan Sampel..... | 7 |
| II.6. Kriteria Responden..... | 8 |
| II.7 Penghitungan Indeks. | 9 |
| III. TEMUAN PENELITIAN | 10 |
| III.1 Karakteristik Responden..... | 10 |
| III.2 Indeks Pelayanan Penanaman Modal Daerah..... | 11 |
| III.2.1 Kelembagaan Instansi Pelayanan Penanaman Modal Daerah. | 11 |
| III.2.2 Pelayanan Perizinan Usaha..... | 13 |
| III.2.3 Mekanisme Pengaduan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan. | 15 |
| III.2.4 Teknologi dan Sistem Informasi Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan. | 17 |
| III.2.5 Ketersediaan dan Kualitas Data/Informasi Pelayanan Penanaman Modal di Daerah. | 18 |

| | |
|---|----|
| III.2.6 Inovasi dan Capaian Keberhasilan Pelayanan Penanaman Modal | 20 |
| III.2.7 Indeks Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Potensi Daerah Secara Umum | 22 |
| LAMPIRAN..... | 23 |
| Lampiran 1: Daftar Indikator Indeks Penilaian Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal di Daerah | 23 |
| Lampiran 2 : Peringkat Kabupaten Terbaik Bidang Pelayanan Penanaman Modal..... | 29 |
| Lampiran 3 : Peringkat Kota Terbaik Bidang Pelayanan Penanaman Modal | 38 |

DAFTAR GAMBAR:

| | |
|--|----|
| Gambar 1 Perusahaan Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja (<i>dalam %</i> , N=8560)..... | 10 |
| Gambar 2 Tingkat Kepemilikan Izin Dasar (<i>dalam %</i> , N=8560)..... | 10 |
| Gambar 3 Tahun Berdirinya Usaha | 10 |
| Gambar 4 Integrasi Institusi yang Melakukan Fungsi Pelayanan Penanaman Modal (<i>dalam %</i> , N=291)..... | 12 |
| Gambar 5 Bentuk Kelembagaan Pelayanan Perizinan di 291 Kabupaten/Kota (<i>dalam %</i> , N=291)..... | 12 |
| Gambar 6. Urutan 10 Daerah Peringkat Teratas dan Terbawah untuk Sub Indeks Kelembagaan Instansi Pelayanan Penanaman Modal Daerah | 13 |
| Gambar 7 Urutan 10 Daerah Peringkat Teratas dan Terbawah Sub Indeks Pelayanan Perizinan | 15 |
| Gambar 8 Urutan 10 Daerah Teratas dan Terbawah untuk Sub Indeks Mekanisme Pengaduan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Penanaman Modal Daerah..... | 16 |
| Gambar 9 Urutan 10 Daerah Teratas dan Terbawah Untuk Sub Indeks Teknologi dan Sistem Informasi Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan..... | 18 |

| | |
|--|----|
| Gambar 10 Urutan 10 Daerah Peringkat Teratas dan Terbawah untuk Sub Indeks Ketersediaan dan Kualitas Data/Informasi Pelayanan Penanaman Modal Daerah | 20 |
| Gambar 11 Urutan 10 Daerah Peringkat Teratas dan Terbawah untuk Sub Indeks Inovasi dan Capaian Keberhasilan..... | 21 |
| Gambar 12 Urutan 10 Daerah Peringkat Teratas dan Terbawah untuk Indeks Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Secara Umum | 22 |

DAFTAR KOTAK:

| | |
|---|----|
| Kotak 1: Variabel Sub Indeks Kelembagaan Instansi Pelayanan Penanaman Modal. | 11 |
| Kotak 2: Daftar Variabel untuk Sub Indeks Pelayanan Perizinan Usaha. | 14 |
| Kotak 3. Variabel Pembentuk Sub Indeks Mekanisme Pengaduan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan. | 15 |
| Kotak 4. Variabel-Variabel Pembentuk Sub Indeks Teknologi dan Sistem Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan..... | 17 |
| Kotak 5. Variabel Pembentuk Sub Indeks Ketersediaan dan Kualitas Data/Informasi Pelayanan Penanaman Modal Daerah..... | 19 |
| Kotak 6: Variabel Pembentuk Sub Indeks Inovasi dan Capaian Keberhasilan. | 20 |

PERINGKAT KUALITAS PELAYANAN PENANAMAN MODAL DI 291 KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Setiap negara membutuhkan penanaman modal untuk menggerakkan perekonomiannya dan mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan. Untuk mendorong penanaman modal, diperlukan pelayanan penanaman modal yang baik. Dengan pelayanan yang berkualitas, kinerja penanaman modal tentunya akan menjadi lebih baik dan berdampak positif pada kemajuan perekonomian. Kualitas pelayanan, menunjukkan kualitas tata kelola pemerintahan yang pada akhirnya akan menumbuhkan kepercayaan investor untuk melakukan investasi.

Indonesia sebagai negara yang terus membangun, tentu membutuhkan penanaman modal yang besar guna menggerakkan perekonomiannya dan mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan. Untuk mendukung pelaksanaan penanaman modal tersebut, diperlukan adanya pelayanan penanaman modal yang baik, sebab dengan adanya pelayanan yang berkualitas, kinerja penanaman modal tentunya akan menjadi lebih baik dan bisa berdampak positif pada kemajuan perekonomian. Selain itu, dengan meningkatnya kualitas pelayanan tersebut, menunjukkan pula *trend* peningkatan tata kelola pemerintahan yang pada akhirnya juga akan menumbuhkan kepercayaan investor untuk melakukan investasi di Indonesia.

Di tataran praktis, kualitas pelayanan penanaman modal ini terkait erat dengan usaha pemerintah baik pusat maupun daerah. Dari sisi kewenangan pemda ada dua hal yang dapat berdampak langsung pada peningkatan penanaman modal, yaitu perijinan dan sistem informasi investasi. Perijinan diperlukan oleh pelaku usaha sebelum melakukan investasi di daerah. Sedangkan sistem informasi sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha terkait dengan kejelasan ketentuan penanaman modal di suatu daerah serta menentukan pilihan investasi yang akan dilakukan di daerah.

Studi ini akan mengukur kualitas pelayanan penanaman modal di tingkat kabupaten/kota, melalui penilaian kualitas aspek perijinan investasi dan sistem informasi. Selain itu juga, akan melihat daerah mana yang memberikan pelayanan terbaik dalam bidang penanaman modal, termasuk praktik-praktik teladan (*best practices*) dalam tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik di bidang investasi.

1.2 Tujuan Penelitian

Studi ini akan mengukur kualitas pelayanan penanaman modal di tingkat kabupaten/kota, melalui penilaian kualitas pelayanan penanaman modal, perijinan investasi, dan sistem informasi. Dengan membuat peringkat indeks kualitas pelayanan penanaman modal kabupaten/kota di Indonesia diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai pelayanan penanaman modal di setiap kab./kota, dan dengan demikian akan diketahui daerah-daerah yang terbaik dalam pelayanan penanaman modal. Secara ringkas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini:

- (1) Mengetahui kualitas pelayanan perijinan dan sistem informasi pelayanan penanaman modal di daerah kab./kota di Indonesia;
- (2) Mengidentifikasi inovasi daerah dalam melakukan pelayanan penanaman modal;
- (3) Membuat peringkat Indeks pelayanan penanaman modal kabupaten/kota di Indonesia.

1.3 Signifikansi

Dari kegiatan survei ini, diharapkan dapat mendatangkan beberapa manfaat, sebagai berikut:

- (1) Bagi investor dapat memperoleh gambaran mengenai pelayanan penanaman modal di setiap kab./kota dan terutama daerah dengan pelayanan penanaman modal terbaik;
- (2) Bagi pemerintah daerah kab./kota diharapkan dapat memperoleh masukan untuk meningkatkan pelayanan penanaman modal;
- (3) Bagi BKPM, hasil studi ini dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam program pemberian penghargaan kepada kab./kota terbaik dalam melakukan pelayanan penanaman modal, serta menjadi masukan bagi perbaikan kebijakan dan penyusunan program ke depan, terutama bidang perijinan dan sistem informasi pelayanan penanaman modal;0
- (4) Bagi KPPOD, bahan studi ini dapat dijadikan sebagai dasar advokasi kebijakan, baik di level pusat maupun Pemda kab./kota terkait.

II. METODOLOGI

II.1 Kerangka Berfikir

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pelayanan Dasar yang Menjadi Urusan Wajib Daerah, pelayanan penanaman modal merupakan salah satu urusan wajib daerah yang memiliki standar pelayanan minimum (SPM). Selanjutnya, didalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Daftar Kewenangan Kabupaten Kota per bidang dari Departemen/Lembaga non Departemen sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas Kepala Daerah di Bidang Penanaman Modal, terdapat 5 (lima) bidang yang menjadi kewenangan Kabupaten Kota terkait Bidang Penanaman Modal, yaitu :

1. kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal;
2. promosi dan kerjasama internasional penanaman modal;
3. pelayanan perizinan penanaman modal;
4. pengendalian penanaman modal;
5. sistem informasi penanaman modal.

Untuk melaksanakan pelayanan publik tersebut, ada beberapa komponen standar pelayanan seperti yang diatur dalam Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Di dalam Undang-Undang tersebut, standar pelayanan terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

- a. dasar hukum;
- b. persyaratan;
- c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
- d. jangka waktu penyelesaian;
- e. biaya/tarif;
- f. produk pelayanan;
- g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
- h. kompetensi pelaksana;
- i. pengawasan internal;
- j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
- k. jumlah pelaksana;
- l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
- m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan
- n. evaluasi kinerja pelaksana.

Dilihat dari komponen pelayanan tersebut di atas, dimensi kualitas masing-masing komponen harus menjadi prioritas, karena bisa

meningkatkan kualitas dari pelayanan. Menurut *Fitz Simmons dan Fitz Simmons (1994)* dimensi kualitas pelayanan adalah: *reliabilitas, assurance, empathy, tangible, dan responsiveness*. *Reliabilitas* adalah keandalan penyelenggara untuk menyediakan jasa pelayanan yang akurat dan bagus, sehingga konsumen tidak akan dirugikan.

Assurance merupakan kemampuan dan perhatian petugas atas pelayanan yang dilakukan sehingga bisa diperoleh kepercayaan dari konsumen. Termasuk didalamnya kemampuan petugas dalam hal pengetahuan atas pelayanan yang diberikan dan ketrampilan dibidangnya masing-masing. *Empathy* merupakan sikap dan perhatian dari petugas kepada konsumen, dan upaya untuk mewujudkannya adalah dengan menunjukkan sikap petugas yang bersahabat dan komunikatif. Elemen kualitas pelayanan lainnya adalah *tangible*, yaitu semua bukti fisik dari penyelenggara pelayanan, sehingga konsumen dapat mengevaluasi jasa melalui aspek fisik tersebut. Dan terakhir adalah *responsiveness*, dimana petugas mempunyai kemauan dalam membantu pelanggan dan memberikan layanan secara tepat.

Kualitas pelayanan penanaman modal sangat terkait dengan aspek-aspek penanaman modal yang menjadi kewenangan dari pemerintah, seperti perijinan, kelembagaan, kualitas peraturan daerah, sistem informasi, akses lahan, infrastruktur dan lainnya. Di pihak pelaku usaha, dalam melakukan investasi disuatu daerah, pelaku usaha tentunya menginginkan kemudahan-kemudahan atau kejelasan yang akan didapatkan jika menanamkan modal disuatu daerah. Pelayanan penanaman modal yang menjadi perhatian pelaku usaha yang ingin menanamkan modalnya di daerah adalah perijinan, informasi mengenai investasi di daerah, keamanan, fasilitas yang didapat jika melakukan penanaman modal di daerah, dan juga layanan informasi.

Dengan memperhatikan aspek-aspek di atas, maka dapat dirumuskan kualitas pelayanan penanaman modal tergantung pada beberapa indikator, yaitu:

1. Aspek kelembagaan instansi pelayanan penanaman modal, termasuk didalamnya keberadaan instansi pelayanan perizinan secara khusus, bentuk lembaga, kewenangan, eselonisasi dan sebagainya;
2. Aspek prosedur pelayanan penanaman modal, termasuk di dalamnya jenis perijinan yang menjadi kewenangan;
3. Aspek kinerja pelayanan penanaman modal, yang mencakup kualitas pelayanan yang berdasarkan standar pelayanan, kemudahan prosedur, biaya, waktu dan persyaratan pelayanan;
4. Aspek akuntabilitas dan transparansi dari pelayanan perizinan, yang ditunjukkan adanya mekanisme pengaduan dan pelaporan atas kualitas pelayanan yang diberikan;

5. Aspek sistem informasi perizinan, termasuk di dalamnya ketersediaan dan kemudahan akses informasi mengenai prosedur, biaya, waktu, tempat perizinan, potensi investasi, dan informasi dasar lainnya yang terkait dengan pelayanan penanaman modal di daerah;
6. Aspek inovasi dan capaian instansi pelayanan penanaman modal, yang mencerminkan inovasi dalam pelayanan modal untuk perbaikan kualitas pelayanan dan selanjutnya dilihat kualitas pelayanan yang terstandarisasi.

II.2 Indikator Penilaian.

Ke-enam aspek tersebut di atas merupakan indikator dasar yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pelayanan penanaman modal di suatu daerah. Untuk itu indikator-indikator dan variabel-variabel yang digunakan untuk melakukan penilaian pelayanan modal yang dilakukan oleh Kab./Kota yang ada di Indonesia mengacu pada ke-enam aspek tersebut di atas. Selain peraturan perundang-undangan, penyusunan indikator juga mangakomodasi berbagai aspek yang menjadi perhatian dunia usaha sebagai pihak yang menjadi pengguna jasa layanan publik ini. Indikator yang disusun mencakup beberapa aspek di bawah ini, yakni:

- (1) Kelembagaan instansi pelayanan penanaman modal;
- (2) Pelayanan perizinan usaha;
- (3) Dukungan teknologi dan sistem informasi penanaman modal dan perizinan;
- (4) Mekanisme pengaduan dan evaluasi kinerja pelayanan;
- (5) Ketersediaan dan kualitas data/informasi pelayanan penanaman modal dan potensi daerah;
- (6) Inovasi dan capaian keberhasilan.

Masing-masing indikator di atas terdiri dari beberapa variabel (keseluruhan ada 31), dan setiap variabel terdiri dari beberapa sub variabel (keseluruhan ada 120 sub variabel). Daftar indikator dan variabel yang digunakan untuk penelitian ini dapat dilihat pada pada ***lampiran 1.***

II.3 Ruang lingkup penelitian

1. Unit analisis penelitian ini adalah kab./kota. Pemilihan kab./kota dalam studi ini dikarenakan kab./kota merupakan daerah tujuan

investasi. Selain itu juga, kab./kota memiliki kewenangan yang besar dalam melakukan pelayanan penanaman modal;

2. Jumlah daerah penelitian sebanyak 300 dari 472 kab/kota dan dipilih berdasarkan PDRB non migas. PDRB non migas digunakan sebagai data acuan pemilihan karena menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Jumlah daerah yang disurvei dibatasi sebanyak 300 kab/kota dengan pertimbangan telah cukup dapat mewakili keberagaman daerah-daerah yang ada di Indonesia (populasi daerah), dan atas pertimbangan keterbatasan dana dan waktu yang tersedia untuk melakukan survei;
3. Penelitian ini hanya memfokuskan pada pelayanan perijinan dan sistem informasi penanaman modal. Dua hal tersebut dipilih sebagai fokus penelitian ini karena mempunyai dampak langsung kepada pelaku usaha atau kepada peningkatan investasi.

II.4 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei persepsi pelaku usaha, isian obyektif dari pejabat pemerintah daerah, serta penilaian *website* daerah tentang pelayanan penanaman modal di setiap daerah.

II.5 Data dan Pengumpulan Data

A. Jenis Data

Data-data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer berupa data kualitatif dan kuantitatif yang diperoleh dengan melakukan survei lapangan kepada nara sumber pelaku usaha di daerah dan juga *key informan* pemerintah. Data-data lain dari pemerintah daerah juga akan dikumpulkan terkait usaha pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan penanaman modal.

1. Data Pemda:

Diperoleh dengan wawancara kepada Pejabat Pemda, dengan menggunakan daftar isian obyektif dari pelaksanaan kegiatan penanaman modal, didukung data capaian dan dokumen yang sah. Dengan instrumen Kuesioner (daftar isian obyektif) untuk Pemda, satu daerah-satu kuesioner (total 300 diseluruh daerah penelitian). Bila satu instansi hanya bisa mengisi sebagian dari pertanyaan dalam kuesioner maka untuk pertanyaan lainnya bisa berasal dari beberapa pejabat dari beberapa instansi.

2. Data Persepsi Pelaku Usaha:

Data-data persepsi mengenai pengalaman perusahaan yang memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan/atau Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam 2 tahun terakhir (2007-Agust 2009). Jumlah perusahaan di setiap daerah sebanyak 30 perusahaan (total 9.000 perusahaan di 300 daerah). Instrumen untuk pengumpulan data adalah Kuesioner untuk Pelaku Usaha, yang diisi dengan proses *face to face interview*.

3. Data Analisa Website Daerah:

Untuk mengetahui salah satu jenis sistem informasi pelayanan penanaman modal dan informasi potensi daerah dilakukan dengan analisa website pemerintah daerah dengan menggunakan *score card*.

B. Teknik Pengumpulan Data

1. Data persepsi pelaku usaha diperoleh dengan *face to face interviews*. Wawancara dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dirumuskan secara terstruktur dan sistematis.
2. Data *Key informan* pemerintah diperoleh juga dengan menggunakan *face to face interviews*. Responden untuk penelitian di setiap daerah penelitian diambil secara random, sehingga memungkinkan data yang diisi dalam kuesioner merupakan suatu data yang telah mempunyai nilai obyektivitas yang tinggi sesuai dengan pengetahuan/ pengertian/kepercayaan individu tentang obyek sikap (*kognitif*) karena pengalaman, lamanya seseorang mengalami aktivitas (bekerja) atau menghadapi persoalan yang diteliti.

II.5 Teknik Pengambilan Sampel

A. Teknik/Tahapan Pengambilan Sampel Daerah

- Daerah-daerah pemekaran yang berusia kurang dari 3 tahun dikeluarkan dari populasi.
- Selanjutnya pemilihan daerah dilakukan dengan metode *stratify random sampling*.
- Daerah-daerah dikelompokkan menjadi tiga kelompok berdasarkan PDRB Non Migas (daerah dengan PDRB Besar, Sedang, dan Rendah).
- Dari setiap kelompok dipilih perwakilan secara proporsional random, sehingga keseluruhan daerah terpilih 300 kab/kota.

B. Teknik/Tahapan Pengambilan Responden Pelaku Usaha

Untuk menjaga kualitas hasil survei maka dipilih teknik penarikan sampel secara probabilitas yakni secara random, sehingga dapat

dilakukan uji statistik dan melihat tingkat kesalahan sampling (*sampling error*). Random Sistematis Sampel adalah sampel yang diperoleh dari suatu daftar semua unit dalam populasi sesuai dengan suatu pola pengambilan yang sistematis yang telah ditentukan. Metode yang sering digunakan (dan digunakan untuk penelitian ini) adalah memilih sampel dengan interval atau selang yang teratur dari daftar semua unit dalam populasi.

Target jumlah sample tiap daerah adalah 30 responden dan secara keseluruhan berjumlah 9000 orang. Tahapan dalam melakukan memilih sample tiap daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat daftar pengusaha/perusahaan yang ada di daerah sebagai basis populasi calon responden. Daftar Perusahaan/pengusaha di daerah diperoleh dari daftar perusahaan yang berbentuk CV dan PT serta memiliki SIUP dan/atau TDP selama dua tahun terakhir yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah daerah kab./kota.
- 2) Memilih responden masing-masing kab./kota sebanyak 30 responden secara random sistematis. Secara teori, semakin besar jumlah sample yang digunakan maka akan memperbesar akurasi perkiraan yang mendekati gambaran dari keadaan yang sesungguhnya dari suatu populasi. Namun dengan berbagai keterbatasan, dalam praktik yang biasa dilakukan dalam suatu survei, batas minimal jumlah responden yang dapat memenuhi ketentuan statistik adalah 30 unit. Selain itu jumlah ini juga merupakan angka minimal yang bisa digunakan apabila ternyata populasi dari obyek penelitian tidak diketahui secara pasti.

II.6. Kriteria Responden

a. Responden Pelaku usaha

Responden adalah pelaku usaha (pemilik perusahaan atau karyawan perusahaan minimal level manajer) terutama yang terlibat dalam pekerjaan administratif harian dan yang pernah mengurus perijinan. Penilaian mereka harus merepresentasikan institusi, bukan individu. Secara garis besar kriteria responden adalah:

1. Perusahaan yang memiliki interaksi yang nyata dengan institusi publik di daerah. Untuk menyeragamkan bentuk hubungan tersebut dan ketepatan informasi dipilih atas dasar kepemilikan SIUP atau TDP (Tanda Daftar Perusahaan) oleh perusahaan.
2. Perusahaan dengan pengambil keputusan manajemen berada pada wilayah kabupaten/kota bersangkutan.

3. Pelaku usaha atau perusahaan yang mengurus perijinan dasar operasional penanaman modal selama 2007 dan 2008.

b. Key Informan Pejabat Pemda Kab./kota

Penarikan responden dilakukan secara purposif, dengan mempertimbangkan beberapa karakteristik: Responden terpilih mewakili institusi pemerintah daerah, terutama institusi publik yang terkait pelayanan penanaman modal. Yang menjadi responden adalah pejabat atau pegawai di institusi-institusi terpilih. Pemilihan responden didasarkan pada pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan responden atas pelayanan penanaman modal dan sistem informasi penanaman modal di daerah kabupaten/kota.

II.7 Penghitungan Indeks.

Dalam melakukan perhitungan indeks dilakukan beberapa tahap sebagai berikut: Menggabungkan variabel kuantitatif (variabel kontinyu) dan kualitatif (diskrit) dengan menghilangkan satuan data masing-masing variabel. Metode untuk menggabungkan variabel-variabel tersebut dalam satu variabel baru berupa variabel komposit, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Standarisasi setiap variabel dengan menggunakan *z. score* dengan rumus sebagai berikut:

$$z = \frac{\bar{x} - x}{\sigma_x}$$

Dimana *z* adalah variabel yang dinormalisasikan, (\bar{x}) adalah nilai rata. rata dari variabel *x* pada satu kab/kota, ($\bar{\bar{x}}$) adalah nilai rata. rata dari semua rata. rata propinsi, dan (σ) adalah standar deviasi dari nilai rata. rata semua kab/kota.

2. Menghitung rata. rata *z. score* setiap responden dan kab/kota indikator *k*:

$$\bar{z}_{ikl} = \sum_{j=1}^m z_{ijkl} / m$$

3. Menghitung indikator variabel komposit *k* setiap Propinsi:

$$t_{kl} = \left(\sum_{i=1}^n (\bar{z}_{ik} - \min(\bar{z}_{ik})) / dif_k * 100\% \right) / n$$

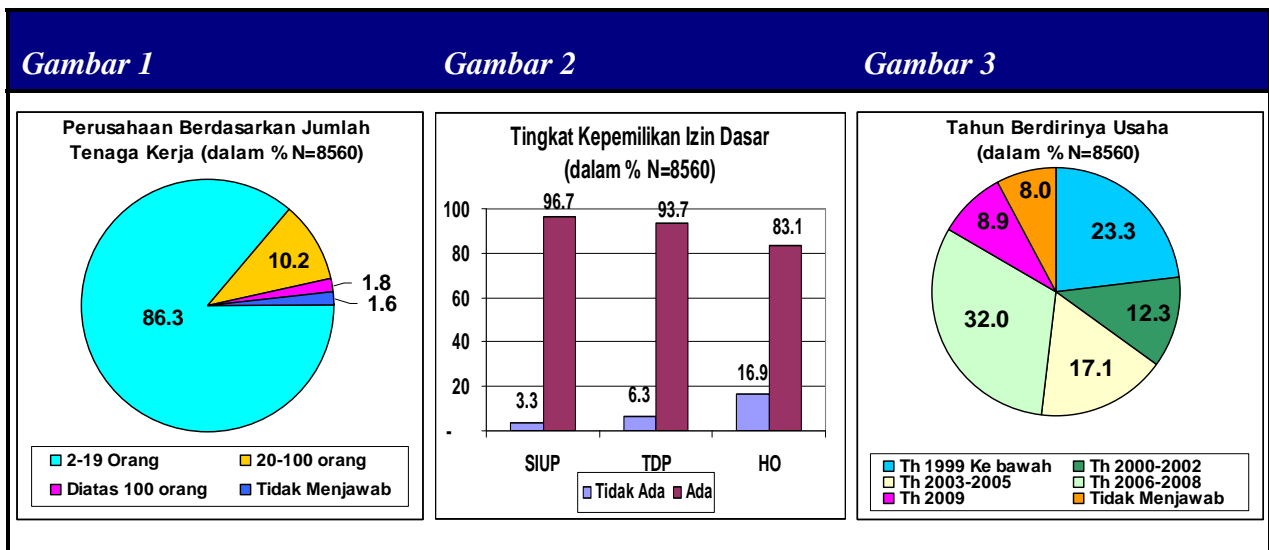
di mana:

$$dif_k = \max(\bar{z}_{ik}) - \min(\bar{z}_{ik})$$

III. TEMUAN PENELITIAN

III.1 Karakteristik Responden

Dari pengolahan data yang berhasil dikumpulkan baik dari data primer berupa data kualitatif dan kuantitatif yang diperoleh dengan melakukan survei lapangan kepada pelaku usaha di daerah dan juga *key informan* pemerintah, serta analisis *website* daerah, diperoleh sejumlah temuan penting. Dalam penelitian ini berhasil diwawancari 8.560 pengusaha. Dilihat dari skala usaha, sebagian besar (86.3%) adalah perusahaan perorangan, kemudian diikuti oleh perusahaan menengah sebesar 10.2%. Sedangkan dari sisi tingkat kepemilikan perizinan dasar untuk operasional perusahaan, diketahui bahwa izin SIUP merupakan tertinggi dibandingkan jenis perizinan TDP dan HO.



Dilihat dari tahun berdirinya perusahaan yang disurvei mayoritas berdiri antara tahun 2006 sampai dengan 2009. Secara keseluruhan perusahaan-perusahaan yang disurvei pernah mengurus perizinan dalam kurun waktu antara tahun 2007-2009, baik perizinan baru maupun perpanjangan izin yang sudah dimiliki tahun-tahun sebelumnya. Selain melakukan survey kepada pelaku usaha, informasi data penelitian ini juga berasal dari website pemerintah daerah dan juga informasi dari pejabat pemda. Responden dipilih mewakili institusi pemerintah daerah, terutama institusi publik yang terkait pelayanan penanaman modal. Yang menjadi responden adalah pejabat atau pegawai di institusi-institusi terpilih.

III.2 Indeks Pelayanan Penanaman Modal Daerah

Selanjutnya beberapa temuan penting dari hasil penelitian dipaparkan dalam ringkasan hasil temuan secara terbatas seperti dipaparkan di bawah ini. Peringkat indeks pelayanan penanaman modal ditampilkan untuk indeks secara keseluruhan, dan juga per sub indeks (6 sub indeks). Peringkat kualitas pelayanan penanaman modal daerah ditampilkan hanya untuk daerah-daerah yang berada pada 10 peringkat teratas dan terbawah baik untuk kelompok daerah kabupaten, maupun untuk kelompok kota. Peringkat keseluruhan daerah yang menjadi obyek penelitian, baik untuk setiap sub indeks, maupun untuk indeks secara keseluruhan dapat dilihat pada bagian lampiran laporan ini.

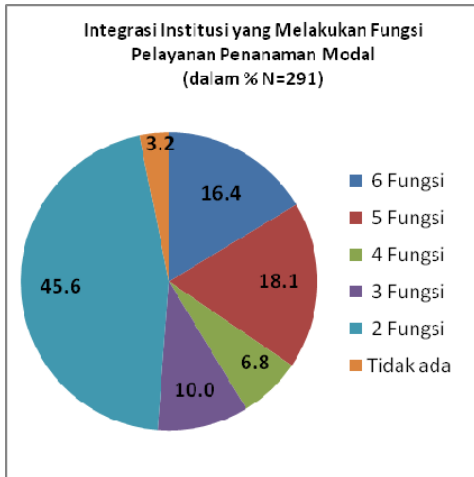
III.2.1 Kelembagaan Instansi Pelayanan Penanaman Modal Daerah.

Sub Indeks Kelembagaan Instansi Pelayanan Penanaman Modal ditujukan untuk melihat dukungan institusi yang berwenang melakukan fungsi pelayanan penanaman modal, seperti membuat kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, promosi dan kerjasama internasional penanaman modal, pelayanan perizinan penanaman modal, pengendalian penanaman modal, dan sistem informasi penanaman modal. Apakah masing-masing fungsi dijalankan oleh satu institusi secara terintegrasi ataupun terpisah-pisah, dan juga dilihat bagaimana kualitas aparatur pelaksana tugas fungsi tersebut. Sub Indeks Kelembagaan Instansi Pelayanan Penanaman Modal terbentuk atas 4 variabel, dan setiap variabel terdiri dari beberapa sub variabel yang keseluruhannya ada 18 sub variabel, seperti terlihat pada Kotak 1.

Kotak 1: Variabel Sub Indeks Kelembagaan Instansi Pelayanan Penanaman Modal.

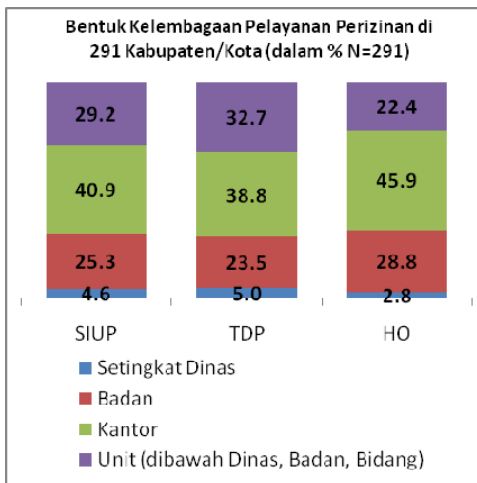
1. Bentuk Kelembagaan Pelayanan Perizinan (3 Sub Variabel)
2. Integrasi Instansi Pelayanan Penanaman Modal Daerah (Perencanaan, Promosi, Pengendalian, dan Pengadaan Sistem Informasi Penanaman Modal) – (5 Sub Variabel).
3. Birokrasi Pelayanan Perizinan di Instansi Pemda (6 Sub Variabel).
4. Kualitas aparatur pelayanan perizinan (4 Sub Variabel).

Gambar 4



Dari survei ini diketahui bahwa hampir seluruh daerah sudah mengintegrasikan fungsi-fungsi pelayanan penanaman modal dalam satu instansi (Gambar 4). Yang paling banyak adalah ada dua fungsi pelayanan penanaman modal terintegrasi dalam satu instansi yakni mencapai 45.6% dari daerah yang disurvei. Sedangkan yang sudah mengintegrasikan 6 fungsi dalam satu instansi baru 16.4% daerah. Perlu dicatat bahwa masih ada 3.2% daerah yang ke-enam fungsi pelayanan penanaman modal semuanya di bawah instansi yang berbeda-beda.

Gambar 5



Selanjutnya dilihat dari instansi yang secara khusus menangani pelayanan perizinan dasar (SIUP, TDP, HO), sudah cukup banyak daerah yang melakukan pelayanan perizinan secara terpadu dalam satu institusi tertentu (Lihat Gambar 5). Mayoritas daerah (38.8% sampai dengan 45.9%) berada pada instansi setingkat kantor yang dikepalai oleh Kepala Kantor setingkat Eselon IIIA. Sebagian lainnya PTSP berupa Badan (23.5% hingga 28.8%) yang dikepalai setingkat Eselon IIB, dan hanya sedikit daerah yang instansi pelayanan perizinan setingkat Dinas (2.8% hingga 5%). Yang perlu mendapat perhatian secara khusus

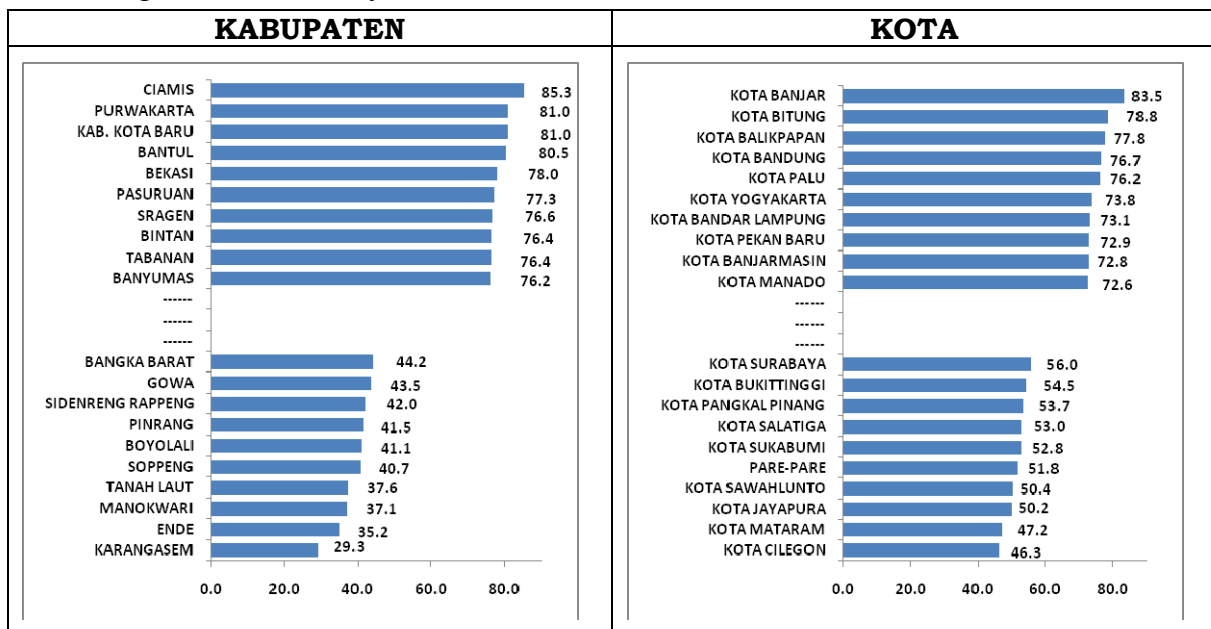
adalah, ternyata masih banyak daerah-daerah yang belum menerapkan PTSP, dimana pelayanan perizinan masih ditangani oleh dinas-dinas teknis terkait 22.4% hingga 32.7%.

Untuk kelompok daerah Kabupaten, Kab. Ciamis, Jawa Barat, menduduki peringkat pertama dengan nilai 85.3. Fungsi-fungsi pelayanan penanaman modal di Ciamis sudah terintegrasi dalam satu instansi yakni Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). BPPT selain menjalankan fungsi perencanaan, pengendalian, dan penyediaan informasi dan data investasi, juga melakukan pelayanan perizinan secara terpadu. Dengan integrasi berbagai fungsi dalam satu instansi ini

memungkinkan pelayanan penanaman modal menjadi lebih baik. Hal ini terbukti dari jumlah interaksi dan jumlah instansi yang harus dilalui oleh pemohon ijin menjadi sangat sedikit.

Dari aspek kualitas sumber daya atau aparatur pelaksana juga sangat baik dan lebih lagi didukung oleh sarana dan prasara teknologi informasi yang memadai. Untuk kelompok Kota, peringkat pertama diduduki oleh Kota Banjar yang juga di Propinsi Jawa Barat dengan nilai 83.5. Hampir sama dengan Ciamis, di Kota Banjar juga sudah ada satu insitusi yang menjalankan berbagai fungsi pelayanan penanaman modal secara terintegrasi, yakni Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Sementara untuk peringkat terbawah, masing-masing diduduki oleh Karangasem untuk kelompok kabupaten, dan Kota Cilegon untuk kelompok kota (Gambar 3). Kedua kota ini belum mengintegrasikan fungsi-fungsi pelayanan penanaman modal di bawah satu intansi tertentu, dan untuk pelayanan perizinan juga belum menerapkan PTSP atau masih diurus diinstansi-intansi teknis terkait.

Gambar 6. Urutan 10 Daerah Peringkat Teratas dan Terbawah untuk Sub Indeks Kelembagaan Instansi Pelayanan Penanaman Modal Daerah



III.2.2 Pelayanan Perizinan Usaha.

Sub Indeks Pelayanan Perizinan ditujukan untuk melihat kualitas pelayanan perizinan dasar kepada pelaku usaha, seperti pelayanan untuk mendapatkan SIUP, TDP dan Izin Gangguan/SITU/HO. Untuk melihat kualitas pelayanan perizinan usaha di daerah digunakan 8

variabel seperti yang terlihat dalam kotak 3 di bawah ini, dan masing-masing terdiri dari beberapa sub variabel (total 28 sub variabel).

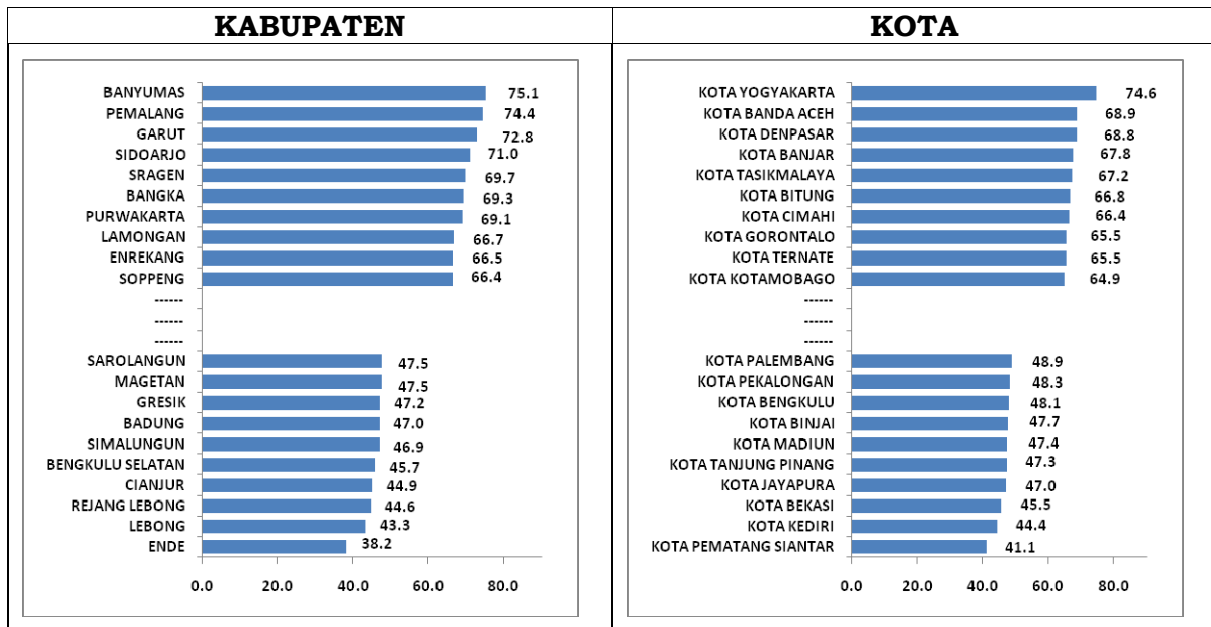
Kotak 2: Daftar Variabel untuk Sub Indeks Pelayanan Perizinan Usaha.

1. Waktu Resmi Pengurusan Perijinan Dasar (3 sub Variabel).
2. Waktu Aktual Pengurusan Perijinan Dasar (4 Sub Variabel).
3. Biaya Resmi Pengurusan Perijinan Dasar (3 Sub Variabel).
4. Biaya Aktual Pengurusan Perijinan Dasar (4 Sub Variabel).
5. Jumlah Persyaratan untuk Mengurus Perijinan Dasar (3 sub Variabel).
6. Pelayanan Perijinan Secara Paralel (2 Sub Variabel).
7. Kemudahan prosedur dan Persyaratan Perijinan (2 Sub Variabel).
8. Pelayanan Perijinan Secara Online (7 Sub Variabel).

Dari survei kepada pelaku usaha maupun kepada pejabat Pemda, masih ditemukan permasalahan klasik dalam pelayanan perizinan yaitu terkait dengan waktu, biaya, prosedur dan persyaratan yang sulit. Baik dari aspek waktu maupun biaya untuk mendapatkan perizinan dasar, ditemukan ada lebih dari 20% pelaku usaha menyatakan bahwa waktu dan biaya lebih besar dibandingkan dengan yang dijanjikan oleh Pemda. Hanya sekitar 2% pelaku usaha yang menyatakan waktu untuk mendapatkan perizinan dasar lebih cepat dari peraturan resmi atau yang dijanjikan oleh Pemda. Survei ini juga diperoleh beberapa praktik baik yang dilakukan oleh Pemda dalam melakukan pelayanan perizinan. Beberapa daerah telah melakukan reformasi birokrasi perizinan untuk mempermudah pelayanan, yakni dengan menerapkan pelayanan perizinan paralel untuk sejumlah izin (66% daerah), dan beberapa daerah bahkan sudah merintis melakukan pelayanan perizinan secara online melalui internet (6 daerah), seperti di Sidoarjo, Sragen, Purwakarta, dan beberapa daerah lainnya.

Untuk Sub Indeks Pelayanan Perizinan, Kabupaten Banyumas berada pada peringkat pertama pada kelompok kabupaten dengan nilai 75.1, dan Kota Yogyakarta peringkat pertama untuk kelompok Kota dengan nilai 74.6, seperti terlihat pada Gambar 4. Di Yogyakarta dan Banyumas, sudah diterapkan pelayanan perizinan secara paralel yang memungkinkan percepatan proses. Dari aspek biaya dan waktu pengurusan, di daerah-daerah ini cukup murah dan mudah. Untuk perizinan SIUP dan TDP bahkan tidak dipungut biaya. Sementara untuk peringkat terbawah kelompok kabupaten diduduki oleh Ende di NTT dengan nilai 38.2, dan Kota Pematang Siantar untuk kelompok kota dengan nilai 41.1. Kedua daerah ini berada pada peringkat terbawah karena rendahnya nilai-nilai variabel pembentuknya. Untuk percepatan izin belum dilakukan secara paralel sehingga dari aspek waktu dan biaya juga memberatkan para pelaku usaha di sana.

Gambar 7 Urutan 10 Daerah Peringkat Teratas dan Terbawah Sub Indeks Pelayanan Perizinan



III.2.3 Mekanisme Pengaduan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan.

Untuk perbaikan kualitas pelayanan harus terus dilakukan evaluasi atas kinerja pelayanan yang telah diberikan. Evaluasi kinerja ini bisa dilakukan secara internal maupun dilakukan dengan meminta penilaian dari pihak yang menerima jasa layanan. Untuk itu ketersediaan mekanisme pengaduan menjadi sangat penting, yakni sebagai sarana bagi pengguna jasa untuk menyampaikan keluhan atas permasalahan yang dihadapi dalam pengurusan perizinan. Pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat dapat dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi secara internal demi perbaikan kualitas layanan kepada masyarakat. Untuk itu Sub Indeks Mekanisme Pengaduan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan dibentuk atas dua variabel ini, dan secara keseluruhan terdiri dari 8 sub variabel (Kotak 3).

Kotak 3. Variabel Pembentuk Sub Indeks Mekanisme Pengaduan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan.

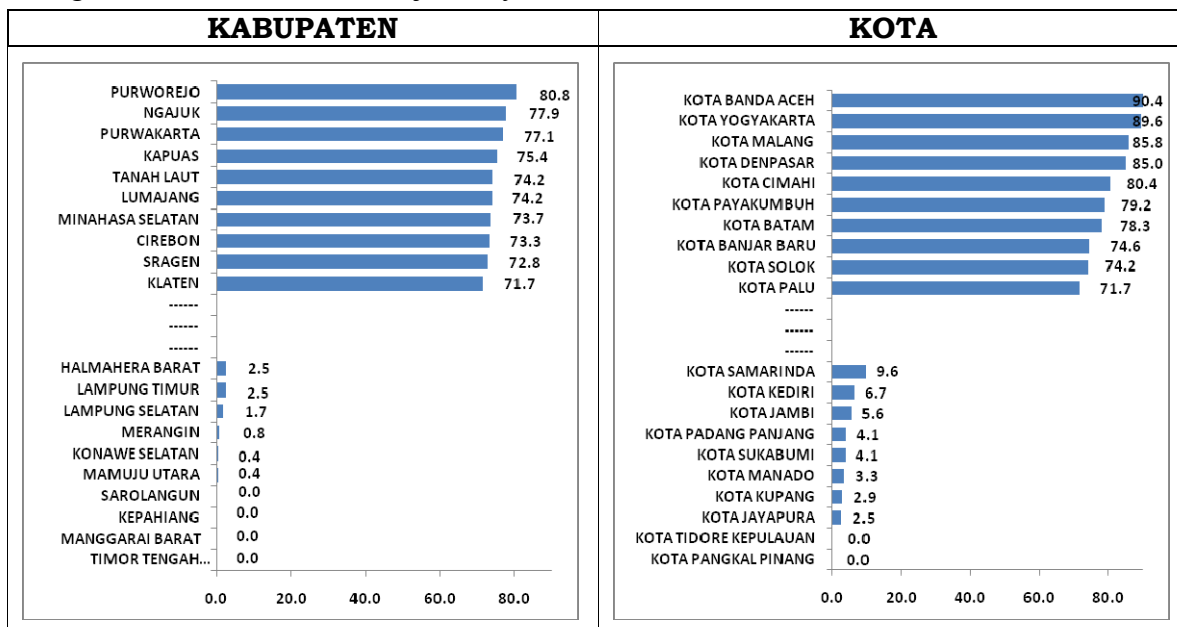
1. Mekanisme Pengaduan atas Pelayanan Perizinan (4 Sub Variabel)
2. Evaluasi Kepuasan Masyarakat (4 Sub Variabel).

Dari survei ini diketahui bahwa masih ada 20% daerah belum memiliki mekanisme pengaduan untuk masyarakat. Dan dari sisi pemda, baru 30,4% diantaranya yang memiliki inisiatif untuk melakukan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan yang mereka berikan. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan perizinan masih belum dipandang sebagai suatu hal yang perlu mendapat perhatian lebih, padahal setiap instansi pelayanan publik dituntut untuk melakukan evaluasi kinerja mereka dengan melibatkan pihak yang memperoleh jasa layanan.

Kota Purworejo dengan indeks 80.8 dan Kota Banda Aceh dengan indeks 90.4 merupakan daerah yang berada pada peringkat pertama untuk masing-masing kelompok daerah kota dan kabupaten. Pada instansi yang menangani pelayanan perizinan di kedua daerah ini telah disediakan mekanisme pengaduan dengan berbagai media dan ada bidang atau instansi khusus yang menanganinya. Secara rutin, kedua daerah tersebut juga melakukan survei kepuasan masyarakat pengguna jasa pelayanan perizinan.

Kebanyakan daerah-daerah yang berada di peringkat terbawah adalah daerah-daerah yang belum menerapkan sistem pelayanan perizinan secara terpadu dalam satu instansi tertentu. Untuk kelompok daerah kabupaten terdapat 4 daerah dengan nilai 0 pada peringkat terbawah, dan untuk daerah kota ada 2 daerah yang memiliki nilai 0. Daerah-daerah tersebut sama sekali tidak menyediakan mekanisme pengaduan, dan lebih lagi tidak pernah melakukan survei kepuasan masyarakat.

Gambar 8 Urutan 10 Daerah Teratas dan Terbawah untuk Sub Indeks Mekanisme Pengaduan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Penanaman Modal Daerah



III.2.4 Teknologi dan Sistem Informasi Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan.

Dengan dukungan teknologi dan sistem informasi yang baik, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal. Untuk itu Sub Indeks Teknologi dan Sistem Informasi Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan dibentuk oleh 3 variabel dan 10 sub variabel, seperti yang terlihat pada Kotak 4.

Kotak 4. Variabel-Variabel Pembentuk Sub Indeks Teknologi dan Sistem Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan.

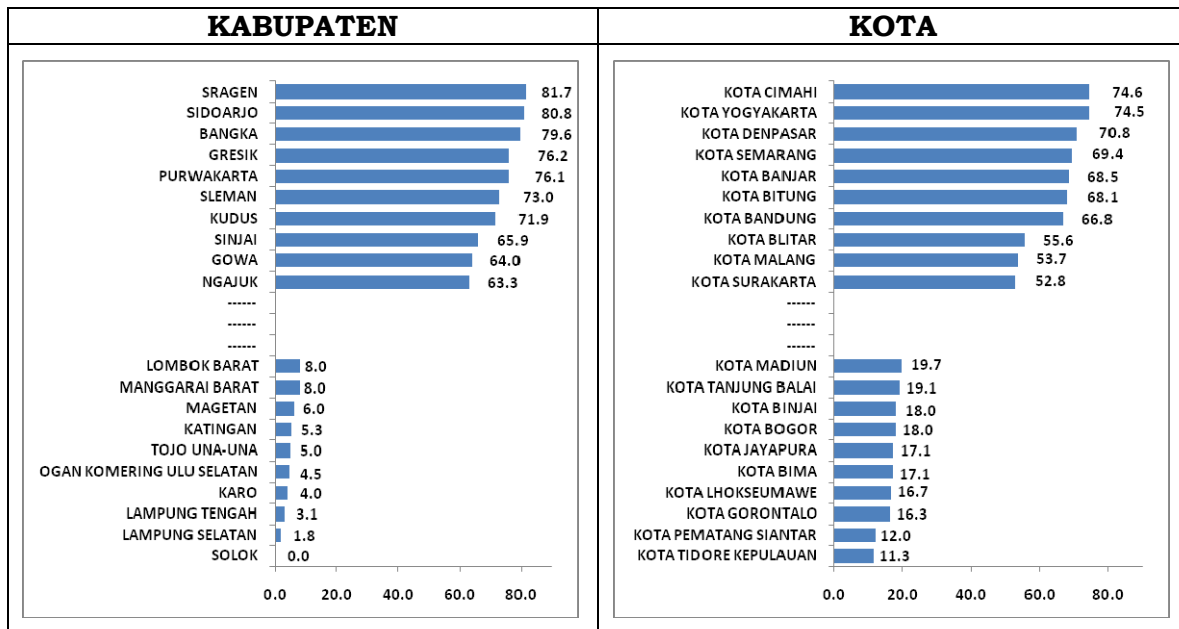
1. Sarana Informasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (3 Sub Variabel)
2. Keberadaan Website Pemerintah Daerah (3 Sub Variabel).
3. Mekanisme Penelusuran Status Izin/*Tracking system* (4 Sub Variabel).

Dari informasi narasumber pemda dan konfirmasi dengan penelusuran terhadap *website* pemda, ternyata terdapat 12.3% Pemda tidak memiliki *website* atau tidak dapat diakses karena sedang dibangun, dan hanya 6.4% Pemerintah daerah yang memiliki *website* khusus untuk pelayanan penanaman modal. Sedangkan *website* yang memuat berbagai informasi dan pelayanan penanaman modal yang tergabung dengan situs resmi pemerintah daerah ada sebesar 26,3%. Namun demikian hanya sedikit pemerintah daerah yang memanfaatkan *website* untuk pelayanan perizinan secara online. Sebagian besar pemerintah daerah masih menggunakan sarana informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal secara konvensional, yakni dengan brosur, CD, Leaflet, dll atau kontak langsung kepada pemda. Dari sisi masyarakat daerah terutama pelaku usaha, ternyata tidak lebih dari 20% yang mengetahui keberadaan *website* pemda, dan bahkan hanya 2% yang pernah mengakses *website* pemda. Teknologi informasi untuk pelacakan status perizinan yang sedang diproses juga belum banyak diterapkan di daerah, terbukti hanya 11.4% pemerintah daerah yang menyediakan mekanisme *tracking system*, dan itupun hanya diketahui oleh sebagian kecil pelaku usaha. Jaringan komputer yang digunakan untuk melayani perizinan sebagian besar belum terkoneksi dengan LAN, hanya 5% pemda yang sudah memiliki jaringan komputer diantara unit komputer yang ada di instansi pelayanan penanaman modal.

Sragen, Sidoarjo, Kota Cimahi, dan Kota Yogyakarta merupakan daerah-daerah yang memiliki dukungan Teknologi dan Sistem Informasi Pelayanan Penanaman Modal yang baik dalam rangka melakukan pelayanan penanaman modal. Daerah-daerah tersebut merupakan daerah-daerah yang berada pada peringkat teratas untuk masing-

masing kelompok daerah. Dari hasil Sub Indeks ini diketahui juga bahwa daerah perkotaan relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah kabupaten dalam hal dukungan teknologi dan sistem informasi pelayanan penanaman modal.

Gambar 9 Urutan 10 Daerah Teratas dan Terbawah Untuk Sub Indeks Teknologi dan Sistem Informasi Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan



III.2.5 Ketersediaan dan Kualitas Data/Informasi Pelayanan Penanaman Modal di Daerah.

Ketersediaan data atau informasi pelayanan penanaman modal sangat dibutuhkan bagi para pelaku usaha terutama mereka yang akan menanamkan modal mereka pada suatu daerah. Untuk itu dalam melihat kualitas pelayanan penanaman modal Sub Indeks Ketersediaan Data/Informasi pelayanan penanaman modal menjadi salah satu indikator penting. Studi ini tidak hanya melihat ketersediaan data pelayanan penanaman modal, tetapi lebih lanjut juga melihat aksesibilitas dan kualitas data yang disediakan oleh pemda. Sub Indeks ini terdiri dari 43 Sub Variabel, yang dikelompokkan ke dalam 10 Variabel, seperti terlihat pada Kotak 5.

Kotak 5. Variabel Pembentuk Sub Indeks Ketersediaan dan Kualitas Data/Informasi Pelayanan Penanaman Modal Daerah.

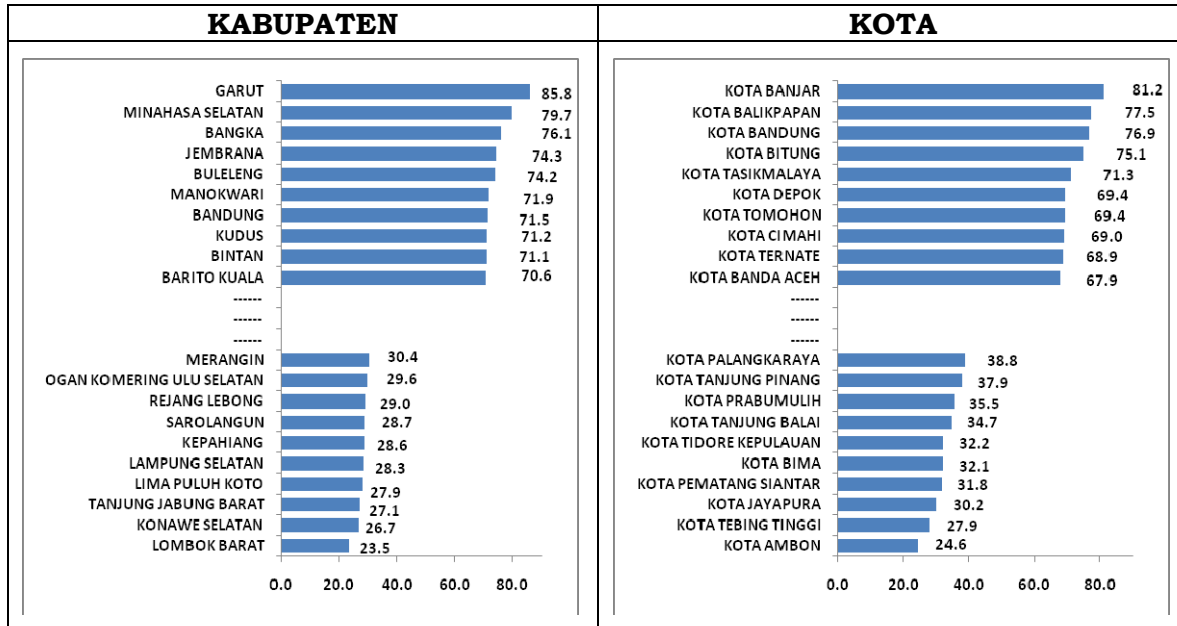
1. Informasi pelayanan perizinan oleh Pemda (persyaratan, biaya, waktu, dan prosedur) (5 Sub Variabel).
2. Informasi Ketersediaan infrastruktur dan sarana akomodasi (5 Sub Variabel).
3. Informasi dan data Peraturan Daerah (7 Sub Variabel).
4. Informasi dan Data Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah (2 Sub Variabel).
5. Informasi dan Data sektor kegiatan usaha di daerah (2 Sub Variabel).
6. Data ketersediaan dan kualitas tenaga kerja di daerah (9 Sub Variabel).
7. Informasi ketersediaan lahan untuk usaha dan Potensi Investasi yang ditawarkan di daerah (4 Sub Variabel).
8. Informasi Kinerja Perekonomian Daerah (1 Sub Variabel).
9. Tingkat kemudahan memperoleh informasi pelayanan perizinan yang disediakan oleh Pemda (4 Sub Variabel)
10. Tingkat kejelasan dan akurasi informasi pelayanan perizinan yang disediakan oleh Pemda (4 Sub Variabel).

Dari studi ini diketahui masih banyak daerah (13%) yang belum memiliki kesadaran akan ketersediaan data mengenai pelayanan penanaman modal, yang termasuk di dalamnya adalah potensi investasi di daerah. Ada 29 Kabupaten yang sama sekali tidak bisa dilacak mengenai data pelayanan penanaman modal, sedangkan untuk kelompok kota terdapat 8 daerah yang tidak dapat dilacak. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat informasi mengenai daerah sangat dibutuhkan bagi para investor yang akan menanamkan modal. Melalui variabel-variabel kualitas, diketahui bahwa data yang disediakan oleh pemerintah daerah tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dari para pelaku usaha. Selain itu data yang disediakan oleh Pemda juga tidak selalu mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari hasil studi ini, dimana ada 60% pelaku usaha yang menyatakan kesulitan untuk mendapatkan data yang mereka butuhkan dari Pemda. Selain itu dari sisi kelengkapan data, hanya 40% pelaku usaha yang menyatakan data yang disediakan oleh pemda sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Kabupaten Garut di Jawa Barat merupakan daerah yang paling lengkap dalam menyediakan data dan informasi pelayanan penanaman modal, dan menduduki peringkat pertama untuk Sub Indeks ini dengan nilai 85.8. Sedangkan Kota Banjar yang merupakan daerah tetangga Garut berada pada peringkat pertama untuk kelompok kota dengan nilai 81.2. Peringkat terbawah diduduki oleh Lombok Barat untuk kelompok

kabupaten dengan nilai 23.5, dan untuk kelompok kota peringkat terbawah adalah Kota Ambon dengan nilai 24.6.

Gambar 10 Urutan 10 Daerah Peringkat Teratas dan Terbawah untuk Sub Indeks Ketersediaan dan Kualitas Data/Informasi Pelayanan Penanaman Modal Daerah



III.2.6 Inovasi dan Capaian Keberhasilan Pelayanan Penanaman Modal.

Setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda dalam pelayanan penanaman modal, dan untuk memenangkan persaingan harus dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk itu dibutuhkan inovasi-inovasi dalam pelayanan penanaman modal. Sehingga pada akhirnya dapat dicapai suatu keberhasilan. Sub Indeks Inovasi dan Capaian Keberhasilan ditujukan untuk melihat bagaimana inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, serta sejauh mana capaian dari pelayanan yang selama ini mereka lakukan. Untuk Sub Indeks Inovasi dan Capaian Keberhasilan terdiri dari 4 variabel, dan 14 Sub Variabel, seperti tampak pada Kotak 6.

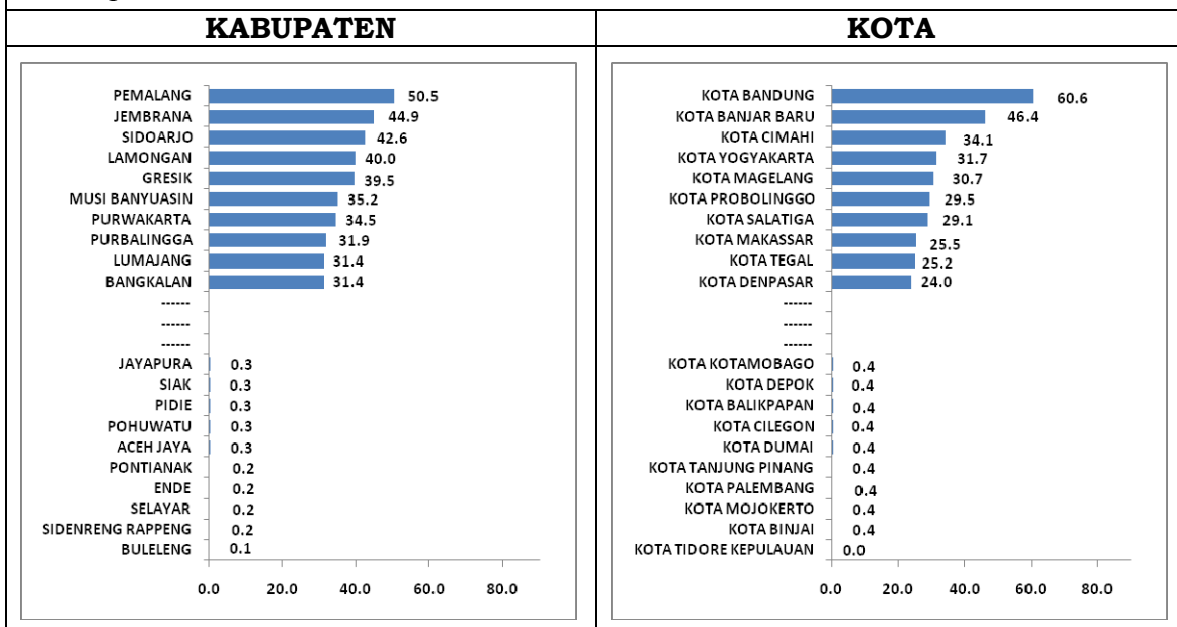
Kotak 6: Variabel Pembentuk Sub Indeks Inovasi dan Capaian Keberhasilan.

1. Inovasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (4 Sub Variabel)
2. Standarisasi Pelayanan Perizinan (4 Sub Variabel)
3. Capaian / Keberhasilan Pelayanan Perizinan (3 Sub Variabel)
4. Perkembangan Jumlah Izin yang dilayani/diterbitkan (3 sub Variabel).

Hanya sedikit daerah-daerah yang melakukan inovasi dalam pelayanan penanaman modal. Inovasi tersebut diantaranya dalam aspek pelayanan perizinan, insentif perpajakan daerah, promosi investasi, dan lain-lain. Dalam hal pelayanan penanaman modal, terdapat 23 (8%) institusi pelayanan penanaman modal di daerah yang sudah tersertifikasi ISO 9001. Hal ini memberikan indikasi positif dimana pelayanan yang diberikan oleh pemda-pemda di 23 daerah tersebut telah terstandarisasi. Dari 55 daerah yang sudah melakukan survei kepuasan masyarakat, mendapatkan rata-rata nilai yang cukup memuaskan, hanya lima diantaranya yang memperoleh nilai dibawah 60. Daerah-daerah yang telah menerapkan PTSP dalam pelayanan perizinan juga memperlihatkan trend meningkat signifikan dalam hal jumlah perizinan yang diterbitkan.

Sedikitnya daerah yang melakukan inovasi dan terstandarisasi dalam melakukan pelayanan perizinan ini tercermin dari nilai sub indeks yang dicapai oleh daerah-daerah yang disurvei. Untuk kelompok daerah kabupaten, Pemalang berada pada peringkat teratas untuk sub indeks ini hanya mendapat nilai 50.5, disusul oleh Jembrana (44.9), dan Sidoarjo (42.6). Sedangkan untuk kelompok kota relatif lebih baik dibandingkan kabupaten. Kota Bandung berada pada peringkat pertama dengan nilai 60.6 disusul oleh Kota Banjar Baru dan Kota Cimahi untuk kelompok daerah kota. Di peringkat terbawah terdapat beberapa daerah yang memiliki nilai yang sama dan dengan nilai yang sangat rendah seperti Buleleng, Sinderereng Rapang, Kota Tidore, Kota Bijai dan sebagainya yang semuanya tidak dapat mencapai nilai 1.

Gambar 11 Urutan 10 Daerah Peringkat Teratas dan Terbawah untuk Sub Indeks Inovasi dan Capaian Keberhasilan

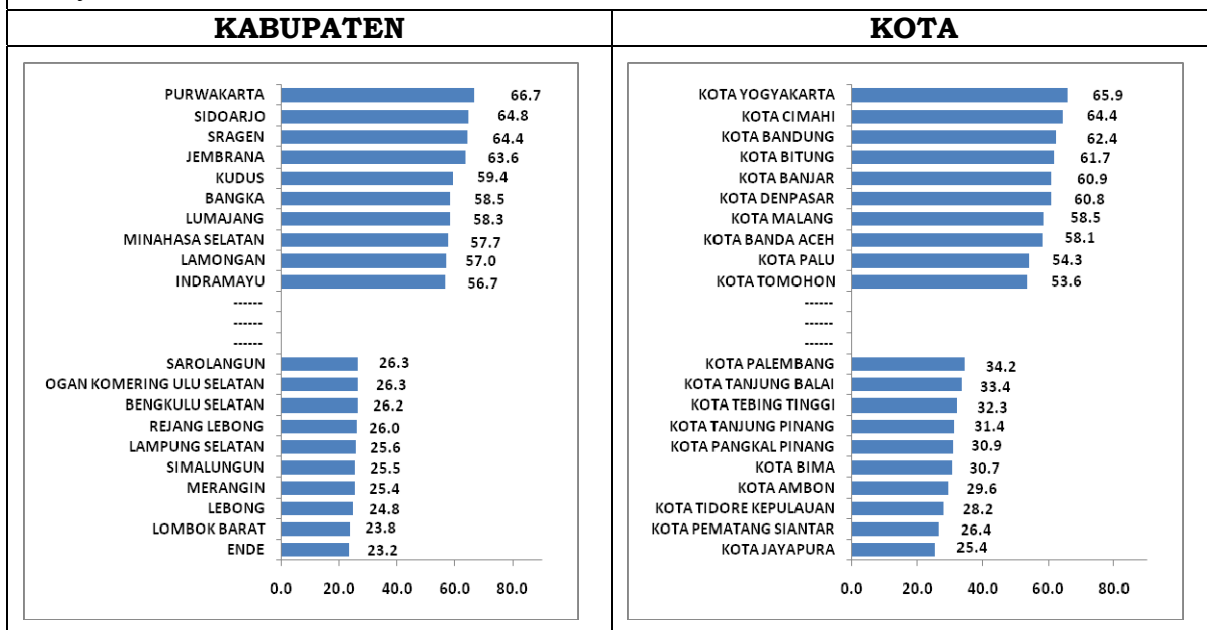


III.2.7 Indeks Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Potensi Daerah Secara Umum.

Indeks Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Potensi Daerah Secara Umum, merupakan rata-rata dari agregasi 6 sub indeks yang sudah dibahas sebelumnya. Dari Indeks secara umum ini kita dapat mengetahui kualitas pelayanan penanaman modal yang dilakukan di suatu daerah. Nilai-nilai indeks menunjukkan sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan oleh daerah.

Secara keseluruhan Pelayanan Investasi dan Sistem Informasi Potensi Daerah di berbagai daerah di Indonesia belum dapat dikatakan baik. Hal ini terbukti dari capaian indeks secara umum untuk daerah kabupaten hanya mencapai 66.7 yang diraih oleh Purwakarta. Di kelompok kota, Yogyakarta berada pada peringkat pertama dengan nilai 65,9. Nilai kedua daerah ini merupakan rata-rata dari 6 sub variabel pembentuk indeks total ini. Dari capaian nilai yang diperoleh kedua daerah yang berada pada peringkat teratas ini masih jauh dari nilai sempurna yakni 100, merupakan bukti bahwa pelayanan penanaman modal di daerah masih belum memuaskan. Dari hasil indeks total ini terlihat ada kecenderungan bahwa daerah-daerah di Pulau Jawa masih mendominasi peringkat atas dibandingkan dengan daerah-daerah di luar Jawa. Perlu upaya dan perhatian khusus terhadap daerah-daerah di yang masih memiliki kinerja kurang baik dalam pelayanan penanaman modal ini mengingat pentingnya bagi upaya untuk menarik dan menggerakkan sektor swasta dalam perekonomian daerah.

Gambar 12 Urutan 10 Daerah Peringkat Teratas dan Terbawah untuk Indeks Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Secara Umum



LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Indikator Indeks Penilaian Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal di Daerah

| NO | FAKTOR DAN INDIKATOR | VARIABEL | | SUMBER DATA |
|-----------|---|----------|--|-------------|
| I. | KELEMBAGAAN INSTANSI PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | |
| 1 | Bentuk Kelembagaan Pelayanan Perizinan | 1 | Bentuk instansi yang menerbitkan ijin SIUP | Pemda |
| | | 2 | Bentuk instansi yang menerbitkan ijin TDP | Pemda |
| | | 3 | Bentuk instansi yang menerbitkan ijin HO/SITU | Pemda |
| 2 | Integrasi Instansi Pelayanan Penanaman Modal Daerah (Perencanaan, Promosi, Pengendalian, dan Pengadaan Sistem Informasi Penanaman Modal). | 4 | Bentuk Instansi yang melakukan perencanaan investasi | Pemda |
| | | 5 | Bentuk instansi yang melakukan promosi investasi | Pemda |
| | | 6 | Bentuk instansi yang melakukan pengendalian investasi | Pemda |
| | | 7 | Bentuk instansi yang melakukan pengadaan sistem informasi investasi | Pemda |
| 3 | Birokrasi Pelayanan Perizinan di Instansi Pemda | 8 | Integrasi instansi pelayanan penanaman modal | Pemda |
| | | 9 | Jumlah Instansi yang harus didatangi untuk mengurus SIUP | Pengusaha |
| | | 10 | Jumlah Instansi yang harus didatangi untuk mengurus TDP | Pengusaha |
| | | 11 | Jumlah Instansi dalam mengurus Ijin HO | Pengusaha |
| | | 12 | Jumlah Interaksi dalam mengurus Ijin SIUP | Pengusaha |
| | | 13 | Jumlah Interaksi dalam mengurus Ijin TDP | Pengusaha |
| 4 | Kualitas aparatur pelayanan perizinan. | 14 | Jumlah Interaksi dalam mengurus SITU/HO | Pengusaha |
| | | 15 | Kejelasan petugas dalam memberikan keterangan mengenai prosedur dan persyaratan. | Pengusaha |
| | | 16 | Kecepatan aparat dalam menangani berkas/dokumen perizinan. | Pengusaha |
| | | 17 | Sopan santun petugas pelayanan. | Pengusaha |
| | | 18 | Kerapihan berpakaian petugas pelayanan perizinan. | Pengusaha |

| NO | FAKTOR DAN INDIKATOR | VARIABEL | | SUMBER DATA |
|--------------------------------------|---|----------|--|-------------|
| II. PELAYANAN PERIZINAN USAHA | | | | |
| 1 | Waktu Resmi Pengurusan Perijinan Dasar (SIUP, TDP & HO) | 19 | Waktu Resmi pengurusan Ijin SIUP | Pemda |
| | | 20 | Waktu Resmi pengurusan Ijin TDP | Pemda |
| | | 21 | Waktu Resmi pengurusan Ijin HO/SITU | Pemda |
| 2 | Waktu Aktual Pengurusan Perizinan Dasar (SIUP, TDP, HO) | 22 | Waktu Aktual SIUP | Pengusaha |
| | | 23 | Waktu Aktual TDP | Pengusaha |
| | | 24 | Waktu Aktual HO | Pengusaha |
| | | 25 | Kesesuaian Waktu | Pengusaha |
| 3 | Biaya Resmi Pengurusan Perijinan Dasar (SIUP, TDP, & HO) | 26 | Biaya resmi pengurusan Ijin SIUP | Pemda |
| | | 27 | Biaya resmi pengurusan Ijin TDP | Pemda |
| | | 28 | Biaya resmi pengurusan Ijin HO/SITU | Pemda |
| 4 | Biaya Aktual Pengurusan Perizinan Dasar (SIUP, TDP, HO) | 29 | Biaya Aktual SIUP | Pengusaha |
| | | 30 | Biaya Aktual TDP | Pengusaha |
| | | 31 | Biaya Aktual HO | Pengusaha |
| | | 32 | Kesesuaian Biaya | Pengusaha |
| 5 | Jumlah Persyaratan untuk Mengurus Perizinan Dasar (SIUP, TDP, & HO) | 33 | Syarat perijinan SIUP | Pemda |
| | | 34 | Syarat Perijinan TDP | Pemda |
| | | 35 | Syarat Perijinan HO/SITU | Pemda |
| 6 | Pelayanan Perizinan Secara Paralel | 36 | Ketersediaan pengurusan ijin secara paralel untuk ijin diatas | Pemda |
| | | 37 | Pararelisasi satu perijinan dasar dengan perijinan lain | Pemda |
| 7 | Kemudahan prosedur dan persyaratan perizinan. | 38 | Tingkat kemudahan persyaratan. | Pengusaha |
| | | 39 | Tingkat kemudahan prosedur. | Pengusaha |
| 8 | Pelayanan Perizinan Secara Online | 40 | Keberadaan formulir permohonan secara online | Pemda |
| | | 41 | Aplikasi izin dapat didownload | Website |
| | | 42 | Pendaftaran bisa dilakukan online | Pemda |
| | | 43 | Aplikasi izin dapat diakses melalui website (daftar online) | Website |
| | | 44 | Pengajuan Persyaratan Dokumen Fisik Perizinan bila pendaftaran online. | Pemda |
| | | 45 | Cara Mendapatkan Dokumen Izin bila pendaftaran online | Pemda |
| | | 46 | Keberadaan Tempat pembayaran | Pemda |

| NO | FAKTOR DAN INDIKATOR | VARIABEL | | SUMBER DATA |
|--|--|----------|---|-------------|
| III. MEKANISME PENGADUAN DAN EVALUASI KINERJA PELAYANAN | | | | |
| 1 | Mekanisme Pengaduan atas Pelayanan Perizinan | 47 | Keberadaan Mekanisme Pengaduan | Pemda |
| | | 48 | Jenis Mekanisme Pengaduan | Pemda |
| | | 49 | Pengaduan pelayanan perizinan di website | Website |
| | | 50 | Pengetahuan masyarakat akan keberadaan mekanisme komplain atas pelayanan perizinan. | Pengusaha |
| 2 | Evaluasi Kepuasan Masyarakat | 51 | Penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat | Pemda |
| | | 52 | Tahun Survey Kepuasan Masyarakat untuk instansi yg menangani SIUP | Pemda |
| | | 53 | Tahun Survey Kepuasan Masyarakat untuk instansi yg menangani TDP | Pemda |
| | | 54 | Tahun Survey Kepuasan Masyarakat untuk instansi yg menangani HO | Pemda |
| IV. TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN | | | | |
| 1 | Sarana Informasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal | 55 | Sistem Jaringan komputer di instansi pelayanan penanaman modal | Pemda |
| | | 56 | Jumlah Sarana Informasi Perizinan | Pemda |
| | | 57 | Jumlah Sarana Informasi Penanaman Modal | Pemda |
| 2 | Keberadaan Website Pemerintah Daerah | 58 | Ketersediaan / Keberadaan website pemda. | Website |
| | | 59 | Keberadaan website pelayanan penanaman modal | Pemda |
| | | 60 | Tingkat pengetahuan pelaku usaha akan keberadaan website pemda. | Pengusaha |
| 3 | Tracking system | 61 | Ketersediaan Tracking System | Pemda |
| | | 62 | Status pengurusan izin usaha yang sedang ditangani Pemda | Website |
| | | 63 | Keberadaan mekanisme penelusuran status perizinan yang sedang diproses (tracking system). | Pengusaha |
| | | 64 | Kemudahan dalam melacak status perizinan yang sedang diurus. | Pengusaha |
| V. KETERSEDIAAN DAN KUALITAS INFORMASI PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN DAERAH | | | | |
| V.1 KUALITAS INFORMASI PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN DAERAH | | | | |
| 1 | Tingkat kemudahan memperoleh | 65 | Tingkat kemudahan memperoleh informasi waktu yang diperlukan | Pengusaha |

| NO | FAKTOR DAN INDIKATOR | VARIABEL | | SUMBER DATA |
|--|---|----------|---|-------------|
| | informasi pelayanan perizinan yang disediakan oleh Pemda. | | untuk memperoleh izin. | |
| | | 66 | Tingkat kemudahan memperoleh informasi biaya perizinan. | Pengusaha |
| | | 67 | Tingkat kemudahan memperoleh informasi prosedur perizinan. | Pengusaha |
| | | 68 | Tingkat kemudahan memperoleh informasi persyaratan perizinan. | Pengusaha |
| 2 | Tingkat kejelasan dan akurasi informasi pelayanan perizinan yang disediakan oleh Pemda. | 69 | Tingkat kejelasan informasi waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin. | Pengusaha |
| | | 70 | Tingkat kejelasan informasi biaya perizinan. | Pengusaha |
| | | 71 | Tingkat kejelasan informasi prosedur perizinan. | Pengusaha |
| | | 72 | Tingkat kejelasan informasi persyaratan perizinan. | Pengusaha |
| V.2 KETERSEDIAAN DATA / INFORMASI PELAYANAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH | | | | |
| 1 | Informasi pelayanan perizinan oleh Pemda (persyaratan, biaya, waktu, dan prosedur). | 73 | Informasi mengenai Prosedur izin usaha secara umum | Website |
| | | 74 | Alamat & no telp tempat pengurusan izin usaha | Website |
| | | 75 | Informasi dinas-dinas teknis (alamat kantor, no. telpon, email). | Website |
| | | 76 | Informasi mengenai syarat izin usaha per jenis izin | Website |
| | | 77 | Informasi mengenai Biaya Pengurusan izin usaha per jenis izin | Website |
| 2 | Informasi mengenai ketersediaan infrastruktur dan sarana akomodasi. | 78 | Data ketersediaan jalan darat di daerah. | Website |
| | | 79 | Data kualitas jalan di daerah. | Website |
| | | 80 | Ketersediaan sambungan telepon. | Website |
| | | 81 | Informasi ketersediaan sambungan listrik. | Website |
| | | 82 | Alamat dan fasilitas hotel dan restoran di daerah. | Website |
| 3 | Informasi dan data mengenai Peraturan Daerah. | 83 | Ketersediaan Perda HO/SITU | Website |
| | | 84 | Ketersediaan Perda SIUP | Website |
| | | 85 | Ketersediaan Perda TDP | Website |
| | | 86 | Ketersediaan Perda IMB | Website |
| | | 87 | Ketersediaan Perda IUI/TDI | Website |
| | | 88 | Ketersediaan Perda Lokasi/Prinsip | Website |
| | | 89 | Ketersediaan Perda lainnya | Website |

| NO | FAKTOR DAN INDIKATOR | VARIABEL | | SUMBER DATA |
|---|---|----------|---|-------------|
| 4 | Informasi dan Data Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah. | 90 | Ketersediaan Data APBD dan perda APBD | Website |
| | | 91 | Ketersediaan Dokumen RPJMD | Website |
| 5 | Informasi dan Data sektor kegiatan usaha di daerah. | 92 | Statistik komposisi industri | Website |
| | | 93 | Daftar perusahaan dan alamat kontak berdasarkan sektor usaha. | Website |
| 6 | Data ketersediaan dan kualitas tenaga kerja di daerah. | 94 | Data jumlah penduduk per jenis kelamin. | Website |
| | | 95 | Data jumlah penduduk per kelompok umur. | Website |
| | | 96 | Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM). | Website |
| | | 97 | Data upah minimum Kab/kota. | Website |
| | | 98 | Data angkatan kerja. | Website |
| | | 99 | Data ketenagakerjaan berdasarkan kualifikasi pendidikan. | Website |
| | | 100 | Data ketenagakerjaan berdasarkan kualifikasi umur. | Website |
| | | 101 | Data ketenagakerjaan berdasarkan lapangan kerja utama. | Website |
| 7 | Informasi ketersediaan lahan untuk usaha dan Potensi Investasi yang ditawarkan di daerah. | 102 | Data/Informasi Pengangguran. | Website |
| | | 103 | Informasi ketersediaan lahan untuk usaha | Website |
| | | 104 | Informasi mengenai investasi yang ditawarkan | Website |
| | | 105 | Statistik komposisi produksi daerah (pertanian, jasa, industri). | Website |
| 8 | Informasi Kinerja Perekonomian Daerah. | 106 | Informasi mengenai produk unggulan daerah, kegiatan produksinya, dan perkembangan terakhir. | Website |
| | | | Informasi kinerja perekonomian daerah (Data PDRB). | Website |
| VI. INOVASI DAN CAPAIAN KEBERHASILAN | | | | |
| 1 | Inovasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal | 107 | Inovasi Bidang Promosi Investasi | Pemda |
| | | 108 | Inovasi Bidang Perijinan Investasi | Pemda |
| | | 109 | Inovasi Bidang Fasilitas/Insentif Penanaman modal | Pemda |
| | | 110 | Inovasi Bidang Lainnya | Pemda |
| 2 | Standarisasi Pelayanan Perizinan | 111 | Sertifikasi ISO instansi Pelayanan Penanaman Modal | Pemda |
| | | 112 | Tahun Perolehan Sertifikasi ISO | Pemda |

| NO | FAKTOR DAN INDIKATOR | VARIABEL | | SUMBER DATA |
|----|---|----------|--|-------------|
| | | | Perijinan SIUP | |
| | | 113 | Tahun Perolehan Sertifikasi ISO Perijinan TDP | Pemda |
| | | 114 | Tahun Perolehan Sertifikasi ISO Perijinan HO | Pemda |
| 3 | Capaian / Keberhasilan Pelayanan Perizinan | 115 | Skor Survey Kepuasan Masyarakat untuk instansi yg menangani SIUP | Pemda |
| | | 116 | Skor Survey Kepuasan Masyarakat untuk instansi yg menangani TDP | Pemda |
| | | 117 | Skor Survey Kepuasan Masyarakat untuk instansi yg menangani HO | Pemda |
| 4 | Perkembangan Jumlah Izin yang dilayani/diterbitkan. | 118 | Perkembangan Jumlah SIUP yang diterbitkan. | Pemda |
| | | 119 | Perkembangan jumlah izin TDP yang diterbitkan. | Pemda |
| | | 120 | Perkembangan jumlah izin HO yang diterbitkan. | Pemda |

Lampiran 2 : Peringkat Kabupaten Terbaik Bidang Pelayanan Penanaman Modal

| NO | PROPINSI | KABUPATEN | Kelembagaan Instansi Pelayanan Penanaman Modal Daerah | Pelayanan Perizinan Usaha | Mekanisme Pengaduan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan | Teknologi dan Sistem Informasi Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan | Ketersediaan dan Kualitas Data/Informasi Pelayanan Penanaman Modal di Daerah | Inovasi dan Capaian Keberhasilan Pelayanan Penanaman Modal | INDEKS PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN DI DAERAH |
|-----------|-----------------|------------------|--|----------------------------------|---|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Barat | Purwakarta | 81.0 | 69.1 | 77.08 | 76.1 | 64.7 | 34.5 | 66.7 |
| 2 | Jawa Timur | Sidoarjo | 74.5 | 71.0 | 58.13 | 80.8 | 63.2 | 42.6 | 64.8 |
| 3 | Jawa Tengah | Sragen | 76.6 | 69.7 | 72.79 | 81.7 | 59.5 | 31.1 | 64.4 |
| 4 | Bali | Jembrana | 67.4 | 65.5 | 71.25 | 47.6 | 74.3 | 44.9 | 63.6 |
| 5 | Jawa Tengah | Kudus | 61.9 | 62.9 | 52.55 | 71.9 | 71.2 | 24.2 | 59.4 |
| 6 | Bangka Belitung | Bangka | 65.7 | 69.3 | 34.65 | 79.6 | 76.1 | 7.7 | 58.5 |
| 7 | Jawa Timur | Lumajang | 70.0 | 62.5 | 74.17 | 45.2 | 62.3 | 31.4 | 58.3 |
| 8 | Sulawesi Utara | Minahasa Selatan | 61.9 | 65.6 | 73.72 | 43.0 | 79.7 | 0.5 | 57.7 |
| 9 | Jawa Timur | Lamongan | 59.6 | 66.7 | 64.38 | 57.0 | 55.5 | 40.0 | 57.0 |
| 10 | Jawa Barat | Indramayu | 73.1 | 58.7 | 71.67 | 61.2 | 54.0 | 24.2 | 56.7 |
| 11 | Jawa Tengah | Jepara | 69.4 | 60.5 | 65.63 | 35.0 | 66.3 | 27.6 | 55.8 |
| 12 | DIY | Bantul | 80.5 | 63.5 | 64.58 | 56.6 | 58.8 | 7.9 | 55.8 |
| 13 | Jawa Timur | Pacitan | 73.7 | 59.0 | 63.96 | 54.8 | 53.2 | 31.0 | 55.5 |
| 14 | Jawa Barat | Bandung | 71.0 | 62.6 | 39.38 | 51.7 | 71.5 | 16.6 | 54.9 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------|----------------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 15 | Jawa Tengah | Demak | 65.1 | 65.4 | 47.29 | 55.1 | 66.5 | 18.1 | 54.8 |
| 16 | DIY | Sleman | 74.3 | 62.8 | 29.17 | 73.0 | 60.8 | 21.9 | 54.7 |
| 17 | Jawa Tengah | Cilacap | 57.8 | 64.5 | 71.25 | 57.0 | 52.2 | 24.9 | 54.2 |
| 18 | Jawa Tengah | Sukoharjo | 56.2 | 65.7 | 63.91 | 48.6 | 60.1 | 24.4 | 54.1 |
| 19 | Jawa Barat | Subang | 75.8 | 64.9 | 57.71 | 41.6 | 63.4 | 11.8 | 54.1 |
| 20 | Jawa Tengah | Purbalingga | 63.4 | 63.6 | 40.63 | 48.9 | 64.9 | 31.9 | 54.0 |
| 21 | Sumatera Barat | Dharmas Raya | 75.6 | 64.0 | 69.48 | 35.4 | 60.9 | 11.6 | 54.0 |
| 22 | Jawa Timur | Gresik | 62.0 | 47.2 | 36.25 | 76.2 | 56.1 | 39.5 | 53.3 |
| 23 | Kalimantan Tengah | Kapuas | 68.7 | 61.2 | 75.42 | 47.6 | 47.7 | 23.9 | 53.2 |
| 24 | Jawa Barat | Garut | 64.8 | 72.8 | 21.67 | 39.0 | 85.8 | 0.4 | 52.9 |
| 25 | Banten | Lebak | 65.2 | 64.2 | 54.38 | 37.0 | 65.7 | 18.1 | 52.9 |
| 26 | Jawa Timur | Probolinggo | 61.3 | 62.5 | 57.71 | 34.6 | 61.5 | 30.7 | 52.8 |
| 27 | Jawa Timur | Ngajuk | 71.3 | 58.2 | 77.92 | 63.3 | 36.5 | 25.4 | 52.7 |
| 28 | Jawa Tengah | Banyumas | 76.2 | 75.1 | 26.25 | 59.2 | 64.7 | 0.5 | 52.4 |
| 29 | Jawa Tengah | Pemalang | 61.4 | 74.4 | 27.08 | 35.0 | 58.7 | 50.5 | 52.3 |
| 30 | Jawa Barat | Cirebon | 74.0 | 53.3 | 73.33 | 42.1 | 49.9 | 18.9 | 51.6 |
| 31 | Sulawesi Utara | Minahasa | 65.7 | 61.4 | 44.37 | 38.3 | 57.5 | 29.2 | 50.6 |
| 32 | Sulawesi Selatan | Bantaeng | 67.5 | 64.1 | 28.78 | 50.5 | 67.5 | 7.6 | 50.5 |
| 33 | Jawa Tengah | Karanganyar | 72.1 | 58.9 | 53.54 | 49.4 | 55.1 | 7.6 | 50.3 |
| 34 | Sumatera Selatan | Musi Banyuasin | 65.0 | 60.1 | 44.17 | 48.4 | 48.7 | 35.2 | 50.0 |
| 35 | Jawa Timur | Pasuruan | 77.3 | 53.2 | 62.92 | 47.9 | 54.2 | 0.4 | 50.0 |
| 36 | Gorontalo | Gorontalo | 66.5 | 56.4 | 49.58 | 34.1 | 62.1 | 18.0 | 49.8 |
| 37 | Jawa Timur | Trenggalek | 65.4 | 51.4 | 67.29 | 41.3 | 50.0 | 22.7 | 49.7 |
| 38 | Kepulauan Riau | Bintan | 76.4 | 59.5 | 19.58 | 49.3 | 71.1 | 0.4 | 49.6 |
| 39 | Jawa Tengah | Klaten | 53.8 | 56.5 | 71.67 | 55.5 | 46.0 | 17.0 | 49.5 |
| 40 | DIY | Gunung Kidul | 44.4 | 64.7 | 58.93 | 51.6 | 54.5 | 17.3 | 49.4 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------|----------------------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 41 | Jawa Barat | Bekasi | 78.0 | 65.9 | 25.42 | 40.9 | 67.2 | 0.4 | 49.3 |
| 42 | Jawa Tengah | Grobogan | 72.4 | 62.1 | 56.88 | 34.5 | 50.8 | 16.8 | 49.2 |
| 43 | Sumatera Selatan | Banyuasin | 71.8 | 63.0 | 38.75 | 30.4 | 69.4 | 0.7 | 49.1 |
| 44 | Jawa Timur | Tuban | 69.2 | 58.4 | 23.33 | 58.6 | 66.3 | 0.5 | 48.9 |
| 45 | Jawa Barat | Sukabumi | 69.8 | 52.8 | 48.78 | 48.1 | 51.7 | 18.8 | 48.8 |
| 46 | Jawa Tengah | Purworejo | 56.1 | 58.0 | 80.80 | 50.2 | 47.0 | 0.6 | 48.5 |
| 47 | Bali | Tabanan | 76.4 | 59.8 | 50.68 | 35.7 | 48.1 | 20.0 | 48.4 |
| 48 | Sumatera Barat | Sawahlunto/Sijunjung | 67.4 | 61.7 | 15.00 | 55.0 | 68.1 | 2.8 | 48.3 |
| 49 | Jawa Timur | Madiun | 60.4 | 61.5 | 48.54 | 40.0 | 53.5 | 16.9 | 47.8 |
| 50 | Jawa Tengah | Batang | 62.7 | 55.0 | 63.54 | 42.8 | 54.0 | 0.4 | 47.5 |
| 51 | Jawa Tengah | Banjarnegara | 62.1 | 60.7 | 53.10 | 27.6 | 53.9 | 20.1 | 47.3 |
| 52 | Jawa Timur | Tulungagung | 61.7 | 65.4 | 30.42 | 39.9 | 66.3 | 0.4 | 47.2 |
| 53 | Jawa Tengah | Pati | 63.1 | 65.9 | 33.75 | 27.0 | 65.7 | 8.3 | 47.1 |
| 54 | Kalimantan Selatan | Kab. Kota Baru | 81.0 | 51.5 | 50.42 | 26.4 | 58.9 | 0.5 | 46.8 |
| 55 | Jawa Tengah | Pekalongan | 64.1 | 49.4 | 69.38 | 27.3 | 54.7 | 7.6 | 46.7 |
| 56 | Jawa Timur | Jombang | 57.2 | 63.0 | 32.08 | 52.5 | 52.9 | 14.8 | 46.5 |
| 57 | Jambi | Tebo | 67.3 | 62.9 | 13.33 | 38.0 | 68.0 | 7.5 | 46.4 |
| 58 | Jawa Timur | Kediri | 57.5 | 50.3 | 61.25 | 30.7 | 58.8 | 5.9 | 46.2 |
| 59 | Kalimantan Selatan | Barito Kuala | 72.6 | 64.7 | 12.92 | 23.2 | 70.6 | 1.8 | 45.2 |
| 60 | Bali | Buleleng | 69.9 | 51.6 | 25.83 | 20.0 | 74.2 | 0.1 | 45.1 |
| 61 | Kalimantan Selatan | Tanah Laut | 37.6 | 47.6 | 74.17 | 12.0 | 55.5 | 29.0 | 44.5 |
| 62 | Jawa Tengah | Brebes | 71.6 | 59.2 | 16.99 | 55.9 | 53.4 | 0.4 | 44.4 |
| 63 | Banen | Pandeglang | 72.5 | 63.2 | 14.01 | 20.7 | 65.8 | 7.8 | 44.3 |
| 64 | Aceh | Aceh Jaya | 65.5 | 62.9 | 17.92 | 30.0 | 66.0 | 0.3 | 44.1 |
| 65 | Sumatera Selatan | Ogan Komering Ilir | 72.5 | 56.5 | 57.92 | 33.0 | 36.2 | 16.2 | 44.1 |
| 66 | Jawa Tengah | Blora | 72.4 | 65.2 | 24.51 | 33.5 | 56.1 | 0.4 | 44.0 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------|------------------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 67 | Bali | Bangli | 58.0 | 52.4 | 54.02 | 18.0 | 62.1 | 0.4 | 43.9 |
| 68 | Jawa Barat | Majalengka | 63.7 | 61.7 | 30.95 | 36.0 | 55.4 | 3.4 | 43.8 |
| 69 | Sulawesi Selatan | Enrekang | 68.5 | 66.5 | 6.25 | 31.6 | 62.7 | 7.9 | 43.7 |
| 70 | Jawa Timur | Bangkalan | 49.7 | 51.9 | 53.54 | 28.1 | 45.2 | 31.4 | 43.6 |
| 71 | Jawa Tengah | Wonogiri | 67.2 | 63.9 | 13.75 | 41.5 | 59.0 | 0.4 | 43.5 |
| 72 | Jambi | Batang Hari | 70.7 | 59.4 | 21.58 | 41.4 | 55.5 | 0.6 | 43.5 |
| 73 | Kalimantan Selatan | Banjar | 66.7 | 55.1 | 40.21 | 28.7 | 50.4 | 12.8 | 43.5 |
| 74 | Jawa Tengah | Boyolali | 41.1 | 58.2 | 56.73 | 39.3 | 45.4 | 16.6 | 43.3 |
| 75 | Jawa Tengah | Tegal | 59.6 | 56.8 | 24.30 | 48.3 | 52.7 | 7.6 | 43.1 |
| 76 | NTB | Sumbawa | 62.7 | 60.3 | 9.58 | 37.4 | 65.1 | 0.8 | 43.0 |
| 77 | Jawa Tengah | Rembang | 62.8 | 62.8 | 17.50 | 32.2 | 62.6 | 0.4 | 43.0 |
| 78 | Jawa Barat | Kuningan | 68.1 | 54.1 | 25.00 | 33.0 | 59.4 | 1.5 | 42.9 |
| 79 | Riau | Kampar | 60.5 | 56.1 | 16.58 | 46.1 | 60.5 | 0.4 | 42.9 |
| 80 | Maluku | Buru | 62.5 | 59.4 | 58.21 | 24.0 | 47.9 | | 42.8 |
| 81 | Jawa Barat | Ciamis | 85.3 | 59.8 | 21.67 | 28.2 | 47.1 | 7.6 | 42.4 |
| 82 | Sumatera Utara | Toba Samosir | 66.4 | 54.2 | 10.24 | 33.9 | 65.5 | 0.6 | 42.3 |
| 83 | DIY | Kulonprogo | 52.0 | 56.0 | 22.99 | 33.1 | 58.1 | 15.0 | 42.2 |
| 84 | Jawa Barat | Cianjur | 70.6 | 44.9 | 15.00 | 44.4 | 59.3 | 0.4 | 42.0 |
| 85 | Aceh | Aceh Tengah | 61.4 | 53.9 | 17.08 | 23.6 | 68.5 | 1.0 | 42.0 |
| 86 | Riau | Kuantan Singingi | 63.6 | 55.2 | 17.50 | 48.2 | 54.4 | 0.4 | 42.0 |
| 87 | Sulawesi Selatan | Sinjai | 59.8 | 53.8 | 14.58 | 65.9 | 45.4 | 7.5 | 41.8 |
| 88 | Jawa Timur | Mojokerto | 64.2 | 50.5 | 15.42 | 34.6 | 49.3 | 27.4 | 41.5 |
| 89 | Sulawesi Tengah | Poso | 65.5 | 59.4 | 15.00 | 35.1 | 57.3 | 0.5 | 41.4 |
| 90 | Jawa Tengah | Semarang | 57.3 | 61.6 | 7.92 | 35.4 | 56.2 | 15.3 | 41.4 |
| 91 | Sumatera Barat | Tanah Datar | 67.9 | 60.8 | 12.08 | 19.7 | 64.5 | 0.5 | 41.4 |
| 92 | Aceh | Aceh Utara | 71.9 | 55.2 | 15.42 | 19.7 | 63.6 | 0.4 | 41.4 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|-------------------------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 93 | Kepulauan Riau | Karimun | 70.4 | 51.9 | 26.25 | 35.4 | 52.6 | 0.4 | 41.4 |
| 94 | Jawa Barat | Tasikmalaya | 56.6 | 64.8 | 18.33 | 29.4 | 59.8 | 0.5 | 41.3 |
| 95 | Lampung | Lampung Timur | 52.9 | 56.3 | 2.50 | 46.4 | 60.8 | 7.6 | 41.0 |
| 96 | Jawa Tengah | Wonosobo | 45.9 | 62.3 | 46.88 | 32.5 | 46.5 | 6.6 | 41.0 |
| 97 | NTB | Lombok Timur | 60.6 | 57.3 | 19.52 | 31.8 | 58.1 | 0.5 | 40.8 |
| 98 | Aceh | Pidie | 66.6 | 61.5 | 17.92 | 25.0 | 56.6 | 0.3 | 40.7 |
| 99 | Banten | Serang | 63.0 | 64.8 | 19.65 | 32.0 | 52.0 | 0.4 | 40.5 |
| 100 | Jawa Tengah | Kebumen | 57.7 | 55.2 | 15.00 | 45.2 | 55.0 | 0.5 | 40.5 |
| 101 | Sulawesi Selatan | Barru | 49.9 | 57.3 | 23.33 | 45.7 | 53.2 | 0.5 | 40.5 |
| 102 | Kalimantan Selatan | Tanah Bumbu | 58.9 | 48.8 | 20.83 | 29.7 | 55.1 | 14.6 | 40.4 |
| 103 | Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Timur | 63.6 | 62.9 | 15.00 | 40.5 | 50.2 | 0.5 | 40.4 |
| 104 | Sulawesi Selatan | Bone | 46.5 | 57.5 | 18.39 | 40.9 | 58.3 | 3.1 | 40.4 |
| 105 | Jawa Timur | Bojonegoro | 48.5 | 55.5 | 15.00 | 45.9 | 47.7 | 22.3 | 40.4 |
| 106 | Maluku Utara | Halmahera Barat | 57.5 | 62.5 | 2.50 | 35.3 | 61.8 | 0.5 | 40.3 |
| 107 | Bengkulu | Seluma | 75.3 | 60.3 | 28.97 | 24.0 | 46.6 | | 40.2 |
| 108 | Sumatera Selatan | Ogan Komering Ulu | 53.1 | 52.6 | 63.99 | 28.0 | 41.6 | 0.4 | 40.2 |
| 109 | NTB | Sumbawa Barat | 61.4 | 60.7 | 7.92 | 34.1 | 57.8 | 0.5 | 40.0 |
| 110 | Bali | Gianyar | 64.6 | 57.5 | 13.91 | 22.0 | 51.5 | 18.5 | 39.9 |
| 111 | Jambi | Muaro Jambi | 57.5 | 57.6 | 11.67 | 39.7 | 56.0 | 0.7 | 39.9 |
| 112 | Sumatera Selatan | Ogan Komering Ulu Timur | 65.5 | 55.0 | 9.58 | 18.9 | 64.8 | 0.4 | 39.9 |
| 113 | Banten | Tangerang | 57.7 | 58.0 | 37.45 | 37.3 | 40.9 | 6.0 | 39.8 |
| 114 | Jawa Timur | Ngawi | 72.1 | 57.5 | 26.67 | 29.7 | 45.9 | 0.6 | 39.7 |
| 115 | Jawa Barat | Bogor | 72.0 | 52.6 | 17.04 | 38.3 | 48.4 | 0.4 | 39.6 |
| 116 | Sulawesi Selatan | Soppeng | 40.7 | 66.4 | 15.00 | 33.2 | 60.3 | 0.5 | 39.5 |
| 117 | Jawa Barat | Karawang | 59.9 | 55.6 | 15.00 | 23.9 | 60.2 | 0.4 | 39.3 |
| 118 | Aceh | Bireun | 66.6 | 58.1 | 10.83 | 23.0 | 57.9 | 0.5 | 39.3 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|-----------------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 119 | Jawa Tengah | Kendal | 55.6 | 65.7 | 17.36 | 24.0 | 55.7 | 0.4 | 39.2 |
| 120 | Maluku | Maluku Tenggara | 47.6 | 57.2 | 40.83 | 37.0 | 39.2 | 13.3 | 39.2 |
| 121 | Riau | Indragiri Hulu | 71.1 | 55.5 | 11.67 | 35.5 | 45.8 | 7.8 | 39.0 |
| 122 | Papua Barat | Manokwari | 37.1 | 58.0 | 3.33 | 29.6 | 71.9 | 0.5 | 38.9 |
| 123 | Sulawesi Tengah | Donggala | 66.4 | 60.2 | 13.99 | 17.3 | 56.6 | 0.6 | 38.8 |
| 124 | Sulawesi Selatan | Selayar | 60.2 | 52.9 | 5.09 | 44.1 | 54.6 | 0.2 | 38.8 |
| 125 | NTT | Sikka | 65.4 | 57.5 | 16.25 | 35.8 | 47.8 | 0.7 | 38.8 |
| 126 | Bengkulu | Bengkulu Utara | 56.9 | 50.6 | 11.05 | 46.9 | 48.3 | 7.7 | 38.5 |
| 127 | Jawa Timur | Banyuwangi | 55.7 | 56.5 | 30.42 | 42.8 | 41.2 | 0.5 | 38.4 |
| 128 | Riau | Siak | 54.9 | 58.2 | 10.00 | 34.4 | 54.8 | 0.3 | 38.2 |
| 129 | Jawa Timur | Malang | 57.9 | 52.8 | 19.17 | 31.6 | 52.6 | 0.5 | 38.2 |
| 130 | sulawesi tenggara | Kolaka | 62.4 | 63.9 | 2.92 | 20.0 | 55.1 | 7.5 | 38.1 |
| 131 | Jawa Timur | Blitar | 51.2 | 61.5 | 24.17 | 35.8 | 46.8 | 0.4 | 38.1 |
| 132 | Lampung | Lampung Utara | 66.7 | 52.8 | 3.75 | 16.0 | 63.0 | 0.4 | 37.9 |
| 133 | Jawa Timur | Ponorogo | 59.4 | 55.6 | 22.92 | 24.0 | 50.9 | 0.4 | 37.7 |
| 134 | Sulawesi Selatan | Takalar | 49.4 | 59.7 | 19.17 | 47.2 | 44.1 | 0.6 | 37.7 |
| 135 | Kalimantan Selatan | Tapin | 46.9 | 62.0 | 2.50 | 24.0 | 63.8 | 0.8 | 37.7 |
| 136 | Sulawesi Selatan | Gowa | 43.5 | 58.0 | 14.01 | 64.0 | 41.5 | 0.6 | 37.6 |
| 137 | Kalimantan Timur | Pasir | 56.9 | 61.4 | 15.42 | 21.7 | 53.6 | 0.4 | 37.6 |
| 138 | Bali | Klungkung | 61.5 | 58.8 | 6.67 | 20.0 | 57.7 | 0.4 | 37.6 |
| 139 | Gorontalo | Pohuwatu | 61.7 | 56.4 | 7.50 | 16.7 | 59.9 | 0.3 | 37.5 |
| 140 | Aceh | Aceh Besar | 47.6 | 58.1 | 8.33 | 40.4 | 52.7 | 0.5 | 37.2 |
| 141 | Kalimantan Tengah | Pulang Pisau | 66.5 | 64.8 | 17.96 | 28.0 | 41.1 | 0.8 | 37.2 |
| 142 | Bali | Badung | 63.5 | 47.0 | 8.75 | 28.7 | 55.7 | 0.6 | 37.1 |
| 143 | NTT | Flores Timur | 57.9 | 54.9 | 9.17 | 17.5 | 59.6 | 0.5 | 37.0 |
| 144 | NTB | Bima | 54.0 | 60.1 | 10.00 | 29.9 | 48.4 | 7.5 | 36.9 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------------------|------|------|-------|------|------|-----|------|
| 145 | Sulawesi Selatan | Sidenreng Rappeng | 42.0 | 60.8 | 13.75 | 28.5 | 56.6 | 0.2 | 36.9 |
| 146 | NTB | Lombok Tengah | 50.6 | 61.7 | 5.42 | 35.2 | 52.1 | 0.6 | 36.8 |
| 147 | Sumatera Selatan | Muara Enim | 58.0 | 50.6 | 14.34 | 30.7 | 48.1 | 7.6 | 36.8 |
| 148 | Sulawesi Barat | Mamuju | 55.8 | 59.1 | 3.75 | 40.7 | 47.9 | 0.4 | 36.5 |
| 149 | Jawa Tengah | Magelang | 65.6 | 58.7 | 19.58 | 25.2 | 42.7 | 0.5 | 36.4 |
| 150 | Jawa Barat | Sumedang | 68.7 | 62.1 | 15.83 | 26.2 | 40.3 | 1.2 | 36.4 |
| 151 | Sulawesi Selatan | Jeneponto | 62.5 | 55.1 | 2.50 | 35.7 | 49.0 | 0.6 | 36.3 |
| 152 | Sulawesi Selatan | Pangkajene Kepulauan | 56.8 | 58.4 | 21.28 | 29.4 | 43.7 | 0.4 | 36.2 |
| 153 | Gorontalo | Bone Bolango | 63.8 | 49.8 | 22.92 | 16.3 | 49.7 | 0.4 | 36.1 |
| 154 | Sumatera Barat | Solok | 74.9 | 64.9 | 25.00 | 0.0 | 43.7 | | 36.0 |
| 155 | Kalimantan Tengah | Gunung Mas | 55.0 | 59.3 | 15.42 | 34.6 | 43.6 | 0.6 | 36.0 |
| 156 | Sulawesi Selatan | Pinrang | 41.5 | 60.8 | 37.92 | 24.7 | 43.0 | 0.5 | 35.9 |
| 157 | Kalimantan Timur | Kutai Barat | 62.0 | 63.4 | 10.00 | 24.0 | 45.7 | | 35.8 |
| 158 | Sulawesi Tengah | Parigi Moutong | 66.5 | 54.1 | 7.08 | 24.0 | 49.1 | 0.7 | 35.8 |
| 159 | NTB | Dompu | 65.1 | 61.4 | 3.71 | 25.7 | 46.9 | 0.7 | 35.8 |
| 160 | NTT | Belu | 51.4 | 52.1 | 7.08 | 21.7 | 58.5 | 0.4 | 35.7 |
| 161 | Sulawesi Tenggara | Kolaka Utara | 63.3 | 52.3 | 2.50 | 18.0 | 52.2 | 9.0 | 35.6 |
| 162 | Kep. Bangka Belitung | Bangka Tengah | 58.3 | 56.1 | 9.09 | 20.5 | 52.4 | 0.6 | 35.6 |
| 163 | Kalimantan Timur | Kutai Kartanegara | 68.5 | 50.7 | 7.08 | 16.3 | 52.7 | 0.5 | 35.5 |
| 164 | Lampung | Tanggamus | 60.1 | 58.0 | 16.67 | 26.0 | 43.0 | 0.8 | 35.4 |
| 165 | Sulawesi Selatan | Maros | 62.0 | 60.4 | 20.46 | 28.1 | 37.5 | 1.4 | 35.3 |
| 166 | Kalimantan Barat | Bengkayang | 63.0 | 60.0 | 2.92 | 18.7 | 51.1 | 0.4 | 35.3 |
| 167 | Sumatera Utara | Asahan | 69.8 | 54.2 | 7.59 | 12.4 | 51.4 | 0.3 | 35.3 |
| 168 | NTT | Kupang | 52.0 | 57.1 | 9.17 | 29.4 | 49.3 | 0.5 | 35.2 |
| 169 | Kalimantan Tengah | Barito Selatan | 51.8 | 48.9 | 7.08 | 26.2 | 55.9 | 0.5 | 35.2 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|----------------------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 170 | Sumatera Utara | Langkat | 61.2 | 55.8 | 22.50 | 24.0 | 41.3 | | 35.2 |
| 171 | Maluku Utara | Halmahera Tengah | 55.8 | 62.5 | 2.50 | 27.7 | 48.0 | 0.5 | 35.0 |
| 172 | Jawa Timur | Magetan | 57.0 | 47.5 | 56.88 | 6.0 | 31.6 | 14.2 | 35.0 |
| 173 | NTT | Timor Tengah Utara | 56.5 | 59.8 | 7.08 | 26.0 | 43.5 | 7.7 | 34.9 |
| 174 | Jambi | Tanjung Jabung Timur | 63.2 | 58.3 | 8.30 | 34.5 | 39.6 | 0.5 | 34.8 |
| 175 | Kalimantan Timur | Penajam Paser Utara | 53.5 | 48.8 | 8.06 | 24.6 | 53.8 | 0.6 | 34.7 |
| 176 | Sumatera Utara | Dairi | 71.0 | 61.7 | 2.50 | 20.7 | 43.3 | 0.5 | 34.7 |
| 177 | Jawa Timur | Bondowoso | 58.1 | 48.9 | 22.50 | 17.4 | 47.3 | 0.5 | 34.6 |
| 178 | Sulawesi Utara | Bolaang Mongondow | 58.7 | 61.5 | 22.08 | 22.7 | 38.0 | 0.6 | 34.5 |
| 179 | Riau | Pelalawan | 56.9 | 57.0 | 2.92 | 34.0 | 44.7 | 0.4 | 34.4 |
| 180 | Sulawesi Tenggara | Konawe | 57.7 | 62.0 | 16.67 | 27.6 | 37.9 | 0.6 | 34.3 |
| 181 | Papua | Jayapura | 48.6 | 48.7 | 24.27 | 20.0 | 48.9 | 0.3 | 34.2 |
| 182 | NTT | Ngada | 56.4 | 55.9 | 10.86 | 27.2 | 43.6 | 0.6 | 34.0 |
| 183 | Jawa Timur | Jember | 59.0 | 54.3 | 12.92 | 17.5 | 43.6 | 0.4 | 33.0 |
| 184 | Sumatera Utara | Karo | 63.8 | 52.2 | 12.86 | 4.0 | 48.1 | 0.4 | 32.8 |
| 185 | Kepulauan Babel | Bangka Selatan | 59.9 | 54.9 | 2.50 | 20.0 | 45.2 | 0.5 | 32.6 |
| 186 | Jawa Timur | Situbondo | 59.0 | 48.1 | 25.42 | 21.1 | 36.2 | 0.4 | 32.4 |
| 187 | Bali | Karangasem | 29.3 | 50.1 | 22.92 | 38.5 | 42.5 | 0.5 | 32.3 |
| 188 | Sulawesi Tengah | Toli-Toli | 59.1 | 54.2 | 6.67 | 12.0 | 46.0 | 0.3 | 32.0 |
| 189 | Sumatera Utara | Deli Serdang | 62.5 | 58.0 | 12.14 | 23.3 | 33.2 | 1.0 | 31.9 |
| 190 | NTT | Manggarai | 50.4 | 58.2 | 3.75 | 29.1 | 40.4 | 0.3 | 31.8 |
| 191 | Sumatera Selatan | Lahat | 67.9 | 48.6 | 13.44 | 11.3 | 39.0 | 0.4 | 31.4 |
| 192 | Gorontalo | Boalemo | 62.2 | 55.8 | 3.75 | 8.8 | 43.7 | 0.4 | 31.2 |
| 193 | Sulawesi Tengah | Tojo Una-Una | 60.6 | 62.3 | 5.00 | 5.0 | 42.4 | 0.3 | 31.1 |
| 194 | Sulawesi Barat | Majene | 49.7 | 49.1 | 2.50 | 13.1 | 51.1 | 0.4 | 31.0 |
| 195 | NTT | Timor Tengah Selatan | 58.2 | 62.5 | 0.00 | 14.0 | 40.3 | 0.6 | 30.8 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---------------------------|------|------|-------|------|------|-----|------|
| 196 | Kalimantan Barat | Pontianak | 58.1 | 53.0 | 6.67 | 12.4 | 42.2 | 0.2 | 30.7 |
| 197 | Sumatera barat | Lima Puluh Koto | 60.6 | 59.7 | 16.25 | 20.7 | 27.9 | 1.0 | 30.6 |
| 198 | Kep. Bangka Belitung | Bangka Barat | 44.2 | 54.6 | 3.84 | 17.7 | 44.1 | 0.5 | 29.8 |
| 199 | NTT | Manggarai Barat | 55.4 | 56.1 | 0.00 | 8.0 | 39.6 | 7.5 | 29.4 |
| 200 | Maluku | Maluku Tengah | 55.0 | 49.7 | 5.28 | 23.4 | 34.0 | 0.4 | 28.8 |
| 201 | Lampung | Lampung Tengah | 70.1 | 51.3 | 6.90 | 3.1 | 35.1 | | 28.8 |
| 202 | Kalimantan Barat | Landak | 59.4 | 49.7 | 2.50 | 16.0 | 35.7 | 0.7 | 28.5 |
| 203 | Sulawesi Barat | Mamuju Utara | 46.8 | 48.8 | 0.43 | 22.7 | 38.4 | 0.4 | 28.0 |
| 204 | Jambi | Tanjung Jabung Barat | 55.1 | 47.6 | 11.20 | 25.7 | 27.1 | 0.4 | 27.8 |
| 205 | Sulawesi Tenggara | Konawe Selatan | 62.1 | 59.9 | 0.43 | 11.8 | 26.7 | 0.5 | 26.9 |
| 206 | Kalimantan Tengah | Katingan | 58.9 | 51.8 | 5.38 | 5.3 | 32.9 | 0.4 | 26.8 |
| 207 | Bengkulu | Kepahiang | 53.6 | 53.0 | 0.00 | 20.7 | 28.6 | 0.6 | 26.4 |
| 208 | Jambi | Sarolangun | 62.0 | 47.5 | 0.00 | 17.0 | 28.7 | 0.5 | 26.3 |
| 209 | Sumatera Selatan | Ogan Komering Ulu Selatan | 60.3 | 52.9 | 6.25 | 4.5 | 29.6 | 0.6 | 26.3 |
| 210 | Bengkulu | Bengkulu Selatan | 56.7 | 45.7 | 8.81 | 8.6 | 31.5 | 0.5 | 26.2 |
| 211 | Bengkulu | Rejang Lebong | 56.0 | 44.6 | 6.59 | 16.7 | 29.0 | 0.4 | 26.0 |
| 212 | Lampung | Lampung Selatan | 63.2 | 55.7 | 1.72 | 1.8 | 28.3 | | 25.6 |
| 213 | Sumatera Utara | Simalungun | 47.3 | 46.9 | 4.06 | 18.6 | 30.5 | 0.5 | 25.5 |
| 214 | Jambi | Merangin | 45.2 | 50.5 | 0.83 | 20.0 | 30.4 | 0.4 | 25.4 |
| 215 | Bengkulu | Lebong | 48.8 | 43.3 | 5.67 | 13.1 | 31.1 | 0.4 | 24.8 |
| 216 | NTB | Lombok Barat | 55.7 | 49.4 | 5.42 | 8.0 | 23.5 | 0.7 | 23.8 |
| 217 | NTT | Ende | 35.2 | 38.2 | 3.33 | 14.5 | 35.3 | 0.2 | 23.2 |

Lampiran 3 : Peringkat Kota Terbaik Bidang Pelayanan Penanaman Modal

| NO | PROPINSI | KOTA | Kelembagaan Instansi Pelayanan Penanaman Modal Daerah | Pelayanan Perizinan Usaha | Mekanisme Pengaduan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan | Teknologi dan Sistem Informasi Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan | Ketersediaan dan Kualitas Data/Informasi Pelayanan Penanaman Modal di Daerah | Inovasi dan Capaian Keberhasilan Pelayanan Penanaman Modal | INDEKS PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN DI DAERAH |
|----|--------------------|------------------|---|---------------------------|--|--|--|--|--|
| 1 | DIY | Kota Yogyakarta | 73.8 | 74.6 | 89.58 | 74.5 | 58.7 | 31.7 | 65.9 |
| 2 | Jawa Barat | Kota Cimahi | 57.0 | 66.4 | 80.42 | 74.6 | 69.0 | 34.1 | 64.4 |
| 3 | Jawa Barat | Kota Bandung | 76.7 | 59.1 | 19.58 | 66.8 | 76.9 | 60.6 | 62.4 |
| 4 | Sulawesi Utara | Kota Bitung | 78.8 | 66.8 | 50.42 | 68.1 | 75.1 | 17.8 | 61.7 |
| 5 | Jawa Barat | Kota Banjar | 83.5 | 67.8 | 28.72 | 68.5 | 81.2 | 15.3 | 60.9 |
| 6 | Bali | Kota Denpasar | 58.6 | 68.8 | 85.00 | 70.8 | 59.3 | 24.0 | 60.8 |
| 7 | Jawa Timur | Kota Malang | 66.7 | 62.6 | 85.83 | 53.7 | 62.5 | 16.0 | 58.5 |
| 8 | Aceh | Kota Banda Aceh | 66.5 | 68.9 | 90.42 | 31.4 | 67.9 | 13.8 | 58.1 |
| 9 | Sulawesi Tengah | Kota Palu | 76.2 | 63.7 | 71.67 | 52.5 | 49.4 | 17.2 | 54.3 |
| 10 | Sulawesi Utara | Kota Tomohon | 71.3 | 62.0 | 56.67 | 28.1 | 69.4 | 18.1 | 53.6 |
| 11 | Kalimantan Selatan | Kota Banjar Baru | 64.7 | 54.9 | 74.58 | 26.5 | 51.0 | 46.4 | 52.7 |
| 12 | Sumbar | Kota Solok | 60.7 | 61.1 | 74.17 | 29.7 | 57.9 | 15.4 | 51.0 |
| 13 | Riau | Kota Pekanbaru | 72.9 | 56.9 | 57.35 | 34.2 | 66.0 | 0.5 | 50.6 |
| 14 | Maluku Utara | Kota Ternate | 71.6 | 65.5 | 46.67 | 29.5 | 68.9 | | 50.1 |
| 15 | Jawa Tengah | Kota Tegal | 70.7 | 60.7 | 50.64 | 39.9 | 51.1 | 25.2 | 49.9 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------|---------------------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 16 | Kepulauan Riau | Kota Batam | 62.5 | 63.0 | 78.33 | 30.3 | 57.1 | | 49.8 |
| 17 | Jawa Tengah | Kota Semarang | 71.4 | 57.5 | 19.81 | 69.4 | 52.0 | 22.4 | 49.2 |
| 18 | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | 77.8 | 60.0 | 24.38 | 25.9 | 77.5 | 0.4 | 49.1 |
| 19 | Jawa Tengah | Kota Salatiga | 53.0 | 55.7 | 62.92 | 38.8 | 48.8 | 29.1 | 48.2 |
| 20 | Banten | Kota Tangerang | 56.4 | 57.7 | 56.67 | 44.3 | 52.7 | 15.5 | 48.0 |
| 21 | Sumatera Barat | Kota Payakumbuh | 66.0 | 60.2 | 79.17 | 32.7 | 44.6 | 7.9 | 47.9 |
| 22 | Jawa Timur | Kota Probolinggo | 67.0 | 57.1 | 34.79 | 37.5 | 52.5 | 29.5 | 47.3 |
| 23 | Jawa Barat | Kota Tasikmalaya | 67.1 | 67.2 | 29.58 | 21.1 | 71.3 | 0.5 | 46.9 |
| 24 | Jawa Tengah | Kota Magelang | 59.3 | 56.3 | 60.21 | 32.0 | 44.8 | 30.7 | 46.9 |
| 25 | Jawa Barat | Kota Depok | 68.3 | 54.0 | 30.00 | 34.4 | 69.4 | 0.4 | 46.6 |
| 26 | Kalimantan Timur | Kota Bontang | 70.8 | 60.4 | 48.89 | 43.9 | 50.9 | | 46.5 |
| 27 | Jawa Barat | Kota Bekasi | 65.5 | 45.5 | 68.93 | 26.6 | 49.1 | 17.9 | 46.1 |
| 28 | Lampung | Kota Metro | 68.3 | 58.0 | 68.36 | 32.0 | 39.1 | 16.7 | 45.9 |
| 29 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | 69.2 | 62.7 | 21.67 | 46.7 | 46.4 | 25.5 | 45.5 |
| 30 | Sultra | Kota Kendari | 62.3 | 60.0 | 23.33 | 50.6 | 60.5 | 0.6 | 45.4 |
| 31 | Jawa Timur | Kota Surabaya | 56.0 | 58.0 | 17.92 | 52.3 | 54.1 | 21.9 | 44.9 |
| 32 | Jawa Tengah | Kota Pekalongan | 67.8 | 48.3 | 62.71 | 41.3 | 42.1 | 9.6 | 44.8 |
| 33 | Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | 72.8 | 64.1 | 18.33 | 29.4 | 62.6 | | 44.3 |
| 34 | Sulawesi Utara | Kota Kotamobago | 66.4 | 64.9 | 15.83 | 39.1 | 61.0 | 0.4 | 44.1 |
| 35 | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | 67.1 | 54.6 | 20.42 | 32.0 | 62.1 | 7.6 | 43.7 |
| 36 | Jawa Timur | Kota Batu | 67.6 | 61.2 | 19.17 | 34.1 | 61.6 | 0.5 | 43.7 |
| 37 | Lampung | Kota Bandar Lampung | 73.1 | 53.5 | 18.60 | 45.2 | 55.1 | 2.4 | 43.3 |
| 38 | Jawa timur | Kota Blitar | 59.7 | 58.6 | 20.37 | 55.6 | 53.4 | 0.6 | 43.1 |
| 39 | Sumatera Barat | Kota Bukittinggi | 54.5 | 60.8 | 33.54 | 24.2 | 58.7 | 9.8 | 42.9 |
| 40 | Kalimantan Barat | Kota Singkawang | 56.5 | 56.9 | 11.51 | 30.1 | 66.0 | 7.6 | 42.1 |
| 41 | Jawa Barat | Kota Bogor | 67.2 | 61.1 | 30.28 | 18.0 | 57.5 | 0.4 | 41.7 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------|---------------------|------|------|-------|------|------|-----|------|
| 42 | Aceh | Kota Lhokseumawe | 70.6 | 64.0 | 13.75 | 16.7 | 61.9 | 0.8 | 41.4 |
| 43 | Jawa Tengah | Kota Surakarta | 59.6 | 58.5 | 17.92 | 52.8 | 49.1 | 0.5 | 41.1 |
| 44 | Gorontalo | Kota Gorontalo | 65.6 | 65.5 | 17.92 | 16.3 | 60.3 | 1.5 | 41.1 |
| 45 | Jawa Timur | Kota Mojokerto | 60.8 | 53.1 | 23.33 | 34.9 | 56.7 | 0.4 | 40.8 |
| 46 | Sulut | Kota Manado | 72.6 | 63.6 | 3.33 | 37.1 | 54.3 | 0.6 | 40.8 |
| 47 | NTB | Kota Mataram | 47.2 | 58.7 | 57.45 | 26.7 | 43.7 | 7.8 | 40.8 |
| 48 | Sulawesi Selatan | Pare-Pare | 51.8 | 58.4 | 17.08 | 43.8 | 55.6 | 0.5 | 40.4 |
| 49 | Sumbar | Kota Padang Panjang | 64.1 | 64.0 | 4.14 | 22.6 | 60.6 | 0.6 | 39.5 |
| 50 | Riau | Kota Dumai | 59.4 | 60.0 | 31.25 | 41.2 | 41.6 | 0.4 | 39.4 |
| 51 | Jambi | Kota Jambi | 61.4 | 55.6 | 5.63 | 28.0 | 62.0 | 0.5 | 39.3 |
| 52 | Sumatera Barat | Kota Sawahlunto | 50.4 | 60.2 | 17.08 | 40.4 | 53.1 | 0.5 | 39.3 |
| 53 | NTT | Kota Kupang | 60.4 | 49.4 | 2.92 | 23.9 | 67.0 | 1.0 | 38.8 |
| 54 | Jawa Barat | Kota Sukabumi | 52.8 | 54.9 | 4.06 | 23.3 | 67.7 | 0.7 | 38.7 |
| 55 | Jawa Timur | Kota Pasuruan | 60.5 | 56.5 | 21.26 | 27.0 | 52.2 | 0.4 | 38.6 |
| 56 | Jawa Barat | Kota Cirebon | 58.8 | 50.4 | 13.92 | 26.7 | 52.3 | 0.4 | 36.4 |
| 57 | Bengkulu | Kota Bengkulu | 66.2 | 48.1 | 15.94 | 19.7 | 51.6 | 1.5 | 36.4 |
| 58 | Sumatera Utara | Kota Binjai | 58.4 | 47.7 | 30.42 | 18.0 | 45.9 | 0.4 | 35.2 |
| 59 | Banten | Kota Cilegon | 46.3 | 53.9 | 16.52 | 39.9 | 44.7 | 0.4 | 35.2 |
| 60 | Jawa Timur | Kota Madiun | 64.4 | 47.4 | 17.50 | 19.7 | 48.2 | 0.4 | 35.1 |
| 61 | Kalimantan Tengah | Kota Palangkaraya | 64.3 | 58.2 | 16.25 | 28.6 | 38.8 | 0.7 | 35.1 |
| 62 | Kalimantan Timur | Kota Samarinda | 58.7 | 50.1 | 9.58 | 23.3 | 50.6 | 0.5 | 34.8 |
| 63 | Sumatera Selatan | Kota Prabumulih | 67.0 | 55.5 | 10.42 | 35.8 | 35.5 | 0.5 | 34.3 |
| 64 | Jawa Timur | Kota Kediri | 64.3 | 44.4 | 6.67 | 24.7 | 49.5 | 0.5 | 34.2 |
| 65 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | 59.4 | 48.9 | 14.58 | 26.8 | 44.5 | 0.4 | 34.2 |
| 66 | Sumatera Utara | Kota Tanjung Balai | 71.4 | 62.6 | 10.83 | 19.1 | 34.7 | 0.4 | 33.4 |
| 67 | Sumatera Utara | Kota Tebing Tinggi | 58.0 | 61.6 | 26.67 | 23.3 | 27.9 | 0.5 | 32.3 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------|-----------------------|------|------|-------|------|------|-----|------|
| 68 | Kepulauan Riau | Kota Tanjung Pinang | 59.4 | 47.3 | 13.05 | 23.5 | 37.9 | 0.4 | 31.4 |
| 69 | Kep. Bangka Belitung | Kota Pangkal Pinang | 53.7 | 56.2 | 0.00 | 23.7 | 41.1 | 0.5 | 30.9 |
| 70 | NTB | Kota Bima | 62.3 | 59.9 | 10.83 | 17.1 | 32.1 | 0.6 | 30.7 |
| 71 | Maluku | Kota Ambon | 58.8 | 50.2 | 23.33 | 25.8 | 24.6 | | 29.6 |
| 72 | Maluku Utara | Kota Tidore Kepulauan | 61.9 | 59.5 | 0.00 | 11.3 | 32.2 | 0.0 | 28.2 |
| 73 | Sumatera Utara | Kota Pematang Siantar | 57.6 | 41.1 | 10.24 | 12.0 | 31.8 | 0.4 | 26.4 |
| 74 | Papua | Kota Jayapura | 50.2 | 47.0 | 2.50 | 17.1 | 30.2 | 0.4 | 25.4 |

--- o0o ---